

**ANOMALI FATWA MAJLIS TARJIH DAN TAJDID PP
MUHAMMADIYAH TENTANG PUASA ‘ARAFAH TAHUN 2003-2015**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Oleh:

ANDI MAULANA

112 111 055

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2016**

H. Khoirul Anwar, S. Ag., M.Ag.
Jl. Bukit Barisan D V/2 Bukit Permata Puri
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Andi Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Andi Maulana

N I M : 112111055

Judul : **Anomali Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah
Tentang Puasa 'Arafah Tahun 2003-2015**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Mei 2016
Pembimbing I



H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031 002

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
Jl. Bukit Beringin Lestari C 131 Wonosari
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Andi Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Andi Maulana

N I M : 112111055

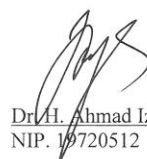
Judul : **Anomali Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah
Tentang Puasa 'Arafah Tahun 2003-2015**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Mei 2016
Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Andi Maulana
NIM : 112111055
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : Anomali Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang
Puasa Arafah tahun 2003-2015

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2015-2016 guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 21 Juni 2016

Ketua Sidang

Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402 200501 1004

Anggota,

Drs. H. Tolkah, M.A.
NIP. 19690507 199603 1 005

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

Anggota

Drs. H. Slamet Hambali, M.Si.
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 19720512 199903 1 003

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ^ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ^ق وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا

الْبُيُوتِ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ^ط وَاتُّوا الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا ^ج وَاتَّقُوا

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٨٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.¹

¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013, hal. 27.

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Duri dan Ibu Toebah
Keduanya merupakan dua insan yang sangat berjasa terhadap kehidupan Penulis, karena telah membimbing dan mengajarkan tentang sebuah kesabaran dan perjuangan yang mereka tanamkan sejak kecil
2. Tete Nur Hasanah beserta Kakak Saefulloh dan Adikku Annisa Nurul Azkiya, yang selalu mendukung untuk kesuksesanku.
3. Para Kyai, Dosen, Guru, dan Ustadz Yang telah mengajarkan ilmu untuk menuju kemuliaan di sisi Allah SWT.
4. Seluruh keluarga tercintaku, yang selalu memberi motivasi serta semangat untuk menuju kesuksesanku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Mei 2016

Deklarator



ANDI MAULANA
NIM. 112 111 055

TRANSLITERASI²

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta	T	-
ث	sa	ṡ	(dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	-
ز	za	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	Sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	-
ف	fa	F	-
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	wawu	W	-
ه	ha	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

² Sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988.

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh :
أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.
جماعة ditulis *jama'ah*.
2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:
كرامة الاولياء ditulis *karamatul-auliya'*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i* dan u panjang ditulis *u*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh:
بينكم ditulis *bainakum*
2. Fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh:
قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم ditulis *a'antum*.

مؤنث ditulis *mu'annas*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis al-. Contoh: القرآن ditulis Al-Qur'an.
2. Bila mengikuti huruf *Syamsiyah*, huruf i diganti dengan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis as-Syi'ah.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:
ذوى ال فروض ditulis *zawi al-furud*.
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:
شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul –Islam*.

ABSTRAK

Berawal dari persoalan pelaksanaan perbedaan umat Muslim di Indonesia dalam melaksanakan puasa 'Arafah yang tidak bertepatan dengan prosesi jamaah haji wukuf di Padang 'Arafah Arab Saudi membuat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa mengenai persoalan hari 'Arafah. Fatwa tersebut dimuat dan dipublikasikan di Majalah Suara Muhammadiyah no 16 tahun 2003 dalam rubrik Fatwa Agama. Isi dari fatwa tersebut cenderung menggunakan matlak Arab Saudi sebagai acuan penetapan awal bulan kamariah terutama untuk bulan-bulan yang terkandung ibadah di dalamnya seperti, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Isi diktum fatwa menjadi kontradiksial dengan apa yang dijadikan pedoman Muhammadiyah sejak lama yaitu dengan metode *Wujūd al-hilāl* kriteria hisab hakiki dan konsep matlak *wilayāt al-hukmi*.

Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti terkait bagaimana anomali fatwa 'Arafah PP Majelis Tarjih dan Tajdid tahun 2003-2015 sebagai jawaban dari anggapan inkosistensi yang ada pada Muhammadiyah. Kemudian apa latar belakang dari fatwa tahun 2003 tersebut, hal ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan dikeluarkannya fatwa tersebut.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara dan naskah fatwa di majalah suara Muhammadiyah rubrik Fatwa Agama untuk menghasilkan data primer. Dokumentasi dengan menghimpun buku-buku, maklumat penetapan awal bulan kamariah Muhammadiyah, karya ilmiah serta artikel artikel sebagai cara mendapatkan data sekunder. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh tokoh falak Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Analisa deskriptif dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan maupun karya tulis tokoh Muhammadiyah.

Hasil analisis menunjukan bahwa adanya anomali dari fatwa puasa 'Arafah tahun 2003-2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa 'Arafah oleh Majelis Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam melaksanakan puasa 'Arafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama dengan matlak *wilayāt al-hukmi*. Faktor yang mempengaruhi yaitu adanya ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid pada saat itu, dan juga faktor sosial karena seringnya terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan puasa 'Arafah.

Kata kunci: *Fatwa 'Arafah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tahun 2003, Puasa 'Arafah, matlak.*

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya untuk Allah Swt, Tuhan seru sekalian alam atas semua karunia dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mempelajari percikan-percikan Ilmu-Nya agar selalu bisa beribadah kepada-Nya. Alhamdulillah, atas semua ridla-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Anomali Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Tentang Puasa ‘Arafah Tahun 2003-2015”** Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang diutus membawa syari’ah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya serta untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya.

Sesudah memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt serta memohonkan salawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad Saw sang pembawa rahmat, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya serta menghidup-suburkan sunahnya, sungguh tak berlebihan jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, turut berjasa dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud penulis haturkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anaknya. Beliaulah yang selalu menanamkan arti kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.
2. Terima kasih untuk Kementerian Agama RI cq Ditjen Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan beasiswa penuh kepada penulis dalam menempuh pendidikan S.1 Ilmu Falak di UIN Walisongo Semarang.
3. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., wakil dekan dan semua dosen di lingkungan UIN Walisongo Semarang

yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi.

4. Terima kasih dan penghargaan yang ikhlas untuk Drs. H. Maksun, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak, Dr. H. Arja Imroni, M. Ag., Drs. H. Slamet Hambali, M.SI., Ahmad Syifaul Anam, SH.I., MH., dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag., atas bimbingan, nasihat dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Drs. Eman Sulaeman, MH., dan Dr. Imam Yahya, M. Ag., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat untuk selalu menjalani masa belajar dengan penuh keseirusan.
6. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada H. Khoirul Anwar, M. Ag., selaku pembimbing I dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., selaku pembimbing II yang turut menyumbangkan gagasan, saran, dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini sejak dari rancangan hingga penulisan dan pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terima kasih untuk Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Fathurrohman, SW., dan segenap pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang telah berkenan memberikan informasi-informasi yang menjadi data dalam penulisan skripsi ini.
8. Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengungkapkan rasa hormat yang tulus kepada semua bapak dan ibu guru (baik ketika menempuh pendidikan formal maupun non formal) yang telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat “membaca” dalam lingkup yang luas.
9. Terima kasih untuk keluarga besar Pondok Pesantren Ta'allumul Huda Salem Brebes, Pondok Pesantren At-Tibyan Majalengka atas segala ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di sana hingga sekarang.

10. Penghargaan dan terima kasih atas sportifitas, kekeluargaan dan loyalitas yang selama ini diajarkan oleh keluarga besar CSS MoRA UIN Walisongo Semarang. *Loyalitas tanpa batas*.
11. Keluarga besar “Forever” yang selalu mengobarkan semangat kebersamaan dan membangun tali persaudaraan di tengah perbedaan: Adin, Ayin, Ichan, Syarif, Wandu, Erik, Makruf, Najib, Oval, Sofyan, Shobar, Sholah, Izun, Kaconk Hady, Dede, Lisa, Zabid, Fidia, Fatih, Nurul, Evi, Hanik, Anik, Tari.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu di sini atas segala perhatian dan pengetahuan yang diberikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap kehadiran skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses integrasi hisab dan rukyat dalam rangka mewujudkan penyatuan kalender hijriah nasional yang dapat diterima semua pihak. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penulis yakin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kepada para pembaca yang budiman untuk memberikan masukan, baik berupa komentar, saran, atau kritik. Insya Allah masukan yang disampaikan akan dijadikan bahan perbaikan pada masa mendatang.

Semarang, 17 Sya’ban 1437 H/24 Mei 2016 M

Andi Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	FIKIH PUASA ‘ARAFAH DAN FATWA
A. Fikih Puasa ‘Arafah	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa ‘Arafah	21
2. Dalil-dalil Puasa ‘Arafah	23
3. Puasa ‘Arafah menurut Para Ulama	28

	4. Puasa ‘Arafah Perspektif Astronomi	37
	B. Fatwa	39
	1. Pengertian Fatwa	39
	2. Syarat-syarat Mufti	40
	3. Fatwa, Qaḍa, dan Ijtihad	42
BAB III	ANOMALI FATWA TENTANG PUASA ‘ARAFAH DAN PENETAPAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH	
	A. Sekilas tentang Muhammadiyah	47
	B. Majelis Tarjih sebagai Lembaga Fatwa	49
	1. Sejarah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah	49
	2. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih	52
	3. Pola Pemetapan Fatwa Majelis Tarjih	55
	C. Fatwa Puasa ‘Arafah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.....	57
	D. Perbedaan Penetapan puasa ‘Arafah Majelis Tarjih pada Tahun 2003-2015	62
BAB IV	ANALISIS ANOMALI FATWA MAJELIS TARJIH PP MUHAMMADIYAH TENTANG PUASA ‘ARAFAH TAHUN 2003-2015	
	A. Analisis anomali Fatwa Puasa ‘Arafah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah	72
	B. Faktor faktor yang melatar belakangi Fatwa Puasa ‘Arafah tahun 2003	83
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran-saran	93
	C. Penutup	94
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah merupakan suatu persoalan yang sangat penting dalam agama Islam karena menyangkut waktu pelaksanaan ibadah, khususnya dalam penentuan awal dan akhir puasa di bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri di bulan Syawal dan hari raya Idul Adha di bulan Zul Hijjah.

Di Indonesia sendiri ragam penentuan awal bulan Kamariah sangat variatif dan masih sangat sulit untuk dipertemukan. Pada akhirnya kontroversi definisi *hilāl* terkait dalam penentuan awal bulan kamariah akibatnya harus kembali kepada masyarakat yang harus dibuat bingung dalam menentukan pilihan. Bagi masyarakat yang menjadi bagian ormas tertentu, biasanya mereka akan condong mengikuti pendapat ormas masing-masing karena kedekatan kultural dan ikatan emosional. Namun bagi masyarakat yang tidak terkait dengan ormas manapun, tentu akan sulit menjatuhkan pilihan.¹

Dalam realitanya perjalanan kalender kamariah di Indonesia masih sering kali terjadi perbedaan dan perdebatan. Diantara beberapa faktor penyebab perbedaan dalam kalender kamariah adalah nash Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber hukum dalam penentapan kalender kamariah.

¹Muh Hadi Bashori, *Pergulatan Hisāb dan Rukyat di Indonesia Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013, hlm. 7

Diantara hadis yang berkenaan dengan kemunculan *hilāl*² sebagai awal waktu pelaksanaan puasa diantaranya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)³

Diriwayatkan oleh Adam, Syu'bah, Muhammad bin Ziyad berkata: saya mendengar Abu Hurairah ra: Dia berkata: Rasulullah saw, atau beliau telah bersabda: Abu Al-Qasim saw telah berkata: ((Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilāl) dan berbukalah karena melihatnya (hilāl). Apabila pandangan kalian tersamar (terhang), maka sempurnakanlah hitungan bulan Syakban menjadi 30 hari)). (HR. Bukhari).

Pemahaman terhadap hadis tersebut secara umum terbagi menjadi dua *madzab* besar, yaitu: *madzab* hisab dan *madzab* rukyat. *Madzab* hisab yang memahami kata rukyat dalam hadis di atas bersifat *ta'aqulli-ma'qul al-ma'na*, sehingga dapat diperluas, dirasionalkan dan dikembangkan. *Madzab* hisab memandang untuk menentukan awal bulan tak harus dengan melihat secara langsung namun bisa ditentukan melalui perhitungan posisi *hilāl*.⁴ Sedangkan *madzab* rukyat lebih memahami hadis rukyat secara *ta'abudi gair ma'qul ma'na*, sehingga penentuan awal bulan tidak dapat dirasionalkan

²*Hilāl* diartikan sebagai Bulan Sabit, dalam bahasa Inggris disebut *Crescent*, yaitu Bulan Sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah ijtima'. Ada tingkat-tingkat penamaan orang Arab untuk bulan (1) *Hilāl*, sebutan Bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal sampai menjelang terjadinya rupa semu Bulan pada terbit awaal (2) *Badr*, sebutan pada Bulan purnama dan (3) *Qamr*, sebutan bagi bulan pada setiap keadaan. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012, h. 76

³Abi Al Hasan Nurdin Muhammad bin Abdu, *Kitab Shahih Al Bukhari*, (Darul Kitab 'Alamiyyah: Beirut-Libanon), 1998, h. 630

⁴Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, (Penerbit Erlangga), 2007, H. 4

dengan hitungan belaka namun juga harus dibuktikan dengan menggunakan pengamatan *hilāl* langsung dengan mata.⁵

Selama ini umat Islam di dunia sering mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, di Indonesia sendiri seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat penentuan awal bulan kamariah, tepatnya hari pertama sebuah bulan yang terkait dengan prosesi ibadah.⁶ lebih tepatnya tiga bulan yang selalu diberikan perhatian khusus oleh umat Islam terutama kalangan praktisi falak maupun astronomi yaitu bulan Ramadan, Syawwal, dan Zulhijjah. Hal ini dikarenakan terdapat waktu pelaksanaan ibadah yang sangat urgen bagi umat Islam di dalam tiga bulan tersebut. Tiga peristiwa yang sering terjadi dalam kalender kamariah adalah:

- Pada saat menentukan akhir bulan Syakban karena terkait dengan hari pertama bulan berikutnya (bulan Ramadan) saat di mana umat Islam harus memulai berpuasa,
- Pada saat menentukan akhir Ramadan, karena hal ini sangat terkait erat dengan hari pertama bulan berikutnya (syawwal) saat di mana prosesi ibadah Idul Fitri dilakukan
- Pada saat menentukan awal bulan Zulhijjah karena terkait dengan hari ke 10 bulan Zulhijjah, saat di mana prosesi ibadah Idul Adha dilakukan.⁷

⁵*Ibid.* h. 4

⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 15

⁷ *Ibid*

Namun, disamping itu juga terdapat satu waktu ibadah di bulan Zulhijjah yakni puasa ‘Arafah yang dilaksanakan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dalam perspektif penanggalan sendiri, Zulhijjah merupakan bulan ke-12 yang sekaligus bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah merupakan sistem penanggalan yang didasarkan pada siklus pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Bulan rata-rata memerlukan 29,53 hari menempuh siklus sinodisnya. Siklus sinodis adalah dasar perhitungan Bulan seperti kalender Hijriah dan kalender Cina. Inilah yang mendasari jumlah hari dalam sebulan terdiri dari 29-30 hari.⁸

Puasa pada bulan Ramadan wajib hukumnya bagi setiap individu muslim dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun, ada ketentuan syariah yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawwal adalah haram hukumnya. Begitu juga dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah merupakan puncak ibadah bagi umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah yakni wukuf di padang ‘Arafah.⁹ Bertepatan dengan hal itu umat Islam di belahan dunia dalam rangka penghormatan disunahkan untuk melakukan puasa ‘Arafah pada hari tersebut. Karena terkait ibadah itulah umat Islam sangat hati-hati dalam menentukan dimulainya bulan baru khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia lebih diidentikan dengan aliran hisab. Hal ini dikarenakan dalam penetapan awal bulan kamariah Muhammadiyah menggunakan metode hisab

⁸ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: al-Ghuraba., 2008, hlm. 58

⁹ Tono Saksono, *op.cit.* hlm. 16

*wujūd al-hilāl*¹⁰ sehingga dalam prakteknya tidak harus menggunakan rukyat. Kriteria *wujūd al-hilāl* yang dipegang oleh Muhammadiyah didasarkan pada keadaan Bulan berada di atas ufuk tanpa memperhitungkan tinggi, sudah terjadi ijtimak qabla al-gurūb dan Matahari terbenam terlebih dahulu daripada Bulan.

Hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki *wujūd al-hilāl*. Dalam hisab hakiki *wujūd al-hilāl*, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- 1) telah terjadi ijtimak¹¹ (konjungsi),
- 2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).¹²

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Yasin ayat 39 dan 40 yang berbunyi,

¹⁰Secara harfiah berarti hilāl telah wujud. Sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dulu daripada bulan (meskipun hanya selisih satu menit atau kurang) yang diukur dari titik Aries hingga benda langit dimaksud dengan pengukuran berlawanan dengan jarum jam. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2012, hlm. 240

¹¹ Ijtimak biasa disebut juga dengan *iqtiran* merupakan suatu peristiwa di saat Bulan dan Matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama, Susiknan Azhari, *Ensiklopedi....* hlm. 93

¹²Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), cet. Kedua, 2009, h. 79

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ

الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua.

tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.¹³

Penyimpulan tiga kriteria di atas dilakukan secara komprehensif dan interkoneksi, artinya difahami tidak semata dari ayat 39 dan 40 surat Yasin *an sich*, melainkan dihubungkan dengan ayat, hadis dan konsep fikih lainnya serta dibantu ilmu astronomi. Dalam surat ar-Rahman dan surat Yunus dijelaskan bahwa Bulan dan Matahari dapat dihitung gerakannya dan perhitungan itu berguna untuk menentukan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Di antara perhitungan waktu itu adalah perhitungan bulan.¹⁴

Muhammadiyah mempunyai sebuah lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan Islam termasuk hisab rukyat, lembaga tersebut adalah Majelis Tarjih¹⁵. Majelis Tarjih dan Tajdid sendiri memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Tafsir Al Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 401

¹⁴Ibid. h. 80

¹⁵Majelis Tarjih adalah suatu lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya di bidang fiqh. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah *khilafiyah* karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 64. Menurut Ahmad Izzuddin KH. Mas Mansur mengusulkan agar dalam persyarikatan Muhammadiyah ada tiga majelis, yakni Majelis tarjih, majelis tanfidz, dan Majelis Taftisy. Ahmad Izzuddin, *Fiqh...*h. 112

kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok: Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.¹⁶ Dari program yang diusung oleh Majelis Tarjih ini nampak jelas bahwa lembaga ini ingin menjembatani dan memberikan solusi perihal permasalahan masyarakat kalangan Muhammadiyah khususnya dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

Salah satu tugas dan wewenang Majelis Tarjih yaitu mengeluarkan fatwa tentang permasalahan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan. Sebagai lembaga ijtihad Majelis Tarjih PP

¹⁶<http://tarjih.Muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, diakses Kamis 22 Oktober 2015

Muhammadiyah mempunyai otoritas penuh dalam memproduksi, memberikan penjelasan dan mengeluarkan fatwa keagamaan termasuk dalam persoalan awal bulan kamariah terutama bulan-bulan yang mengandung unsur ibadah wajib di dalamnya seperti Ramadan, Syawwal, serta Zulhijjah termasuk di dalamnya hari puasa 'Arafah.

Diantara fatwa yang pernah dikeluarkan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah adalah mengenai pelaksanaan puasa 'Arafah tahun 2003. Fatwa tersebut dimuat di Majalah Suara Muhammadiyah, yang isinya cenderung untuk menetapkan Mekah sebagai matlak (tempat acuan menentukan awal bulan). Fatwa tersebut muncul untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang hukum puasa 'Arafah yang dilakukan tidak bertepatan pada hari pelaksanaan wukuf. Waktu itu terjadi perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah antara Pemerintah (Kementrian Agama) dengan Arab Saudi. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa pada saat itu ormas-ormas Islam di Indonesia maupun pemerintah sama-sama menggunakan matlak wilayāt al-hukmi, sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan dengan Arab Saudi. Kebetulan Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi, sementara Pemerintah Indonesia berbeda.¹⁷

Kemudian dari sinilah banyak yang mempertanyakan mengenai konsistensi Muhammadiyah dalam memegang kriteria yang sejak dulu dipakai yaitu wujūd al-hilāl dan memakai matlak' wilayāt al-hukmi termasuk dalam penetapan Zulhijjah dan puasa 'Arafah. dalam kasus hari 'Arafah.

¹⁷ Wawancara dengan Amiruddin, staf sekretaris PP Muhammadiyah di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 November 2015

Anggapan inkosistensi muncul seiring dengan terjadinya perbedaan penetapan hari 'Arafah Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Hal ini dilatar belakangi karena baik antara Muhammadiyah dan Arab Saudi sama-sama menggunakan hisab dalam penetapannya yang kemudian muncul anggapan bahwa kebersamaan Muhammadiyah dengan Arab Saudi di dalam hari 'Arafah merupakan suatu keharusan.

Perbedaan penetapan antara Muhammadiyah dan Arab Saudi dalam hari raya Idul Adha maupun 'Arafah sebagai salah satu contoh bahwa kebersamaan antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi suatu keharusan merupakan anggapan yang keliru. Sebagai contoh hasil hisab Zulhijjah 1436 H/2015 M yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam surat No. 027/1.1/B/2015 tanggal 21 Jumadil akhir 1436 H/11 April 2015 M, dengan ketinggian Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($(\phi = -07^{\circ}48'$ dan $\lambda = 100^{\circ}21'$ BT) = $+0^{\circ}25'52''$). Sehingga menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi 14 September 2015 M, sedangkan tanggal 9 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa Wage 2015 M, dan 10 Zulhijjah (Idul Adha) 1436 H jatuh pada hari Rabu Kliwon 23 September 2015 M. Dan hari 'Arafah (9 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage 22 September 2015,¹⁸

Sedangkan di lain pihak berkembang informasi bahwa di Arab Saudi tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 M, hari 'Arafah (9 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Rabu 23 September 2015 M dan

¹⁸ Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.O/E/2015. Pdf.

Idul Adha (10 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 September 2015 M.¹⁹ Sementara itu Senin 13 september Kemenag melalui dirjen BIMAS Islam menyampaikan hasil sidang isbat sebagai hasil dari penggunaan metode imaknur ru'yat terkait dengan penentuan hari 'Arafah dan hari raya Idul Adha. Pemerintah memutuskan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Selasa 15 September 2015 sehingga hari 'Arafah (9 Dzhulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan Idul Adha (10 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Kamis 24 september 2015.²⁰

Dalam bulan Zulhijjah tahun ini Muhammadiyah dalam hal ini memahami bahwa puasa 'Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan kalender bulan Zulhijjah pada di wilayah Indonesia sesuai dengan hasil perhitungan metode hisab wujūd al-hilāl . Oleh karena itu, puasa 'Arafahnya tidak harus bersamaan dengan jamaah haji yang sedang wukuf di padang 'Arafah ketika terjadi perbedaan hari antara Muhammadiyah dan pemerintah Arab Saudi.²¹

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana anomali fatwa Majelis Tarjih mengenai puasa 'Arafah yang penulis batasi dari rentan tahun 2003-2015 mengingat adanya fatwa mengenai puasa 'Arafah sendiri ada pada tahun 2003. Studi tersebut

¹⁹Lihat di <http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-‘Arafah-mengikuti-wukuf-atau.html>, diakses Kamis 22 Oktober 2015

²⁰*Ibid.*

²¹<http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-‘Arafah-mengikuti-wukuf-atau.html>, diakses hari Kamis 22 Oktober 2015

kemudian penulis angkat dalam skripsi dengan judul “Anomali Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang puasa ‘Arafah tahun 2003-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dari tahun 2003-2015?
- b. Apa yang menjadi latar belakang adanya fatwa Majelis tarjih Muhammadiyah tahun 2003 tentang puasa ‘Arafah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemahaman tentang Majelis Tarjih dan fatwa Majelis Tarjih dalam hal puasa ‘Arafah
2. Menjelaskan anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah sehingga mendapatkan informasi lebih mengenai aspek apa saja yang melatarbelakanginya
3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendasari fatwa tahun 2003 mengenai puasa ‘Arafah dari Majelis Tarjih Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bahan acuan bagi penulis lain yang ingin meneliti lagi dari aspek lainnya dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika
2. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa penelitian baik dari skripsi maupun tesis dan disertasi tentang ilmu falak khususnya yang membahas terkait persoalan Muhammadiyah dibandingkan dengan penelitian ini masih tersapat perbedaan-perbedaan yang substansial. Sekalipun banyak penelitian-penelitian yang membahas Muhammadiyah namun masih belum menyinggung permasalahan fatwa Majelis Tarjih sebagaimana yang penulis akan jadikan penelitian. Maka berdasarkan penelusuran penulis terhadap buku atau karya ilmiah atau hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini adalah:

Skripsi Hafidzul Aetam yang berjudul, *Analisis Sikap Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriyah Di Indonesia*. Dalam skripsinya, Aetam mengupas tentang sikap Muhammadiyah terhadap upaya penyatuan kalender Hijriyah. Sikap Muhammadiyah merupakan langkah persuasif untuk membangun kematangan kriteria dalam gagasan kalender hijriah yang bersatu. Kemungkinan Muhammadiyah untuk melebur kepada pemerintah sangat terbuka, dengan beberapa catatan mengenai konsep penyatuan serta kriteria di antaranya adalah: permasalahan kriteria yang baku, kriteria yang mencakup

hisab dan rukyat dan reposisi fungsi hisab maupun rukyat. Apabila beberapa aspek di atas dipenuhi dan menjadi bahan evaluasi terhadap penyatuan kalender hijriah, kemungkinan terbesar Muhammadiyah akan menyisihkan *wujūd al-hilāl* dan meruntuhkan berbagai pernyataan politis dari pimpinan Muhammadiyah apabila mengedepankan kepentingan bersatu dalam waktu ibadah.²²

Penelitian Hafidzul Aetam tentang *Interpretasi Hadis-Hadis Rukyat dalam Kajian Falak Muhammadiyah (Pendangan Kritis Muhammadiyahatas Penetapan Rukyatul Hilāl Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan)*. Dalam penelitian tersebut, Muhammadiyah memandang metode rukyat yang selama ini digunakan oleh beberapa ormas dan pemerintah tidak maksimal dengan adanya kelemahan dari segi subyek *observer*, lokasi pengamatan di Indonesia maupun obyek yang dirukyat. Sehingga dengan menggunakan pertimbangan surat Ar Rahman ayat 5, Yunus ayat 5, hadis Kuraib dan hadis Abu Bakr Ibn Abi Syaibah, Muhammadiyah memperluas makna rukyat dalam hadis-hadis perintah rukyat menjadi tidak hanya sekedar rukyat terapan, namun juga dengan pengetahuan maupun perhitungan serta pemahaman kata *faqdurūlah* sebagai perintah untuk melakukan perhitungan.²³

Disertasi Rupi'i Amri tentang *Dinamika Penentuan Awal Bulan Qamariyah Muhammadiyah*, Rupi'i menjelaskan tentang keadaan umat Islam yang pada waktu itu masih ummi, belum mengenal baca tulis dan hisab

²²Hafidzul Aetam, “*Analisis Sikap Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah Di Indonesia*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013

²³Hafidzul Aetam, *Interpretasi Hadis-Hadis Rukyat Dalam Kajian Falak Muhammadiyah*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo, 2014

astronomis yang kemudian dijadikan ‘*illat*’ atas dalam pemahaman terhadap terhadap dalil-dalil perintah rukyatulhilal sehingga metode *wujūd al-hilāl* digunakan oleh Muhammadiyah sebagai tolok ukur awal bulan Qamariyah. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kecenderungan terhadap reorientasi *wujūd al-hilāl* di kalangan Muhammadiyah pada kriteria astronomis baru sampai pada pemikiran para tokohnya dan belum merupakan keputusan resmi organisasi. Kecenderungan pemikiran ini lebih banyak mengarah pada visibilitas *hilāl* internasional.²⁴

Penelitian Rupi’i Amri tentang *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia*, penelitian ini mengupas tentang pemikiran Thomas Djamaluddin terhadap upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia. Thomas memandang bahwa perlu adanya redefinisi *hilāl* terlebih dahulu dalam kriteria hisab yang telah dijelaskan melalui hasil observasi. Thomas juga memberikan penawaran kriteria visibilitas *hilāl* di Indonesia pada tahun 2003 dengan kriteria: 1. Umur Bulan harus > 8 jam, 2. Jarak sudut Bulan-Matahari harus $> 5,6^\circ$, tetapi apabila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , maka beda tingginya harus $> 9^\circ$, kriteria ini dinamakan dengan kriteria LAPAN 2003 sebagai kriteria alternatif pengganti kriteria MABIMS. Namun pada tahun 2011, Thomas Djamaluddin kembali merombak kriteria visibilitas yang dikenal dengan kriteria hisab rukyat Indonesia dengan kriteria, Jarak sudut Bulan-Matahari $> 6,4^\circ$ dan beda tinggi Bulan Matahari $> 4^\circ$. Meskipun sudah beberapa tahun sejak kriteria tersebut

²⁴Rupi’i Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah*, Disertasi S2 Fakultas Syariah, Semarang: Program Doktor IAIN Walisongo Semarang, 2012

dirilis, namun hingga saat ini hanya ormas PERSIS yang telah mempergunakannya, kebanyakan ormas lainnya masih kukuh dengan metode penentuan awal bulan yang dipegangnya.²⁵

Makalah Muhammad Hassan yang berjudul “Aplikasi Imkanurrukyat Prespektif Fiqih dan Astronomi”. Dalam penelitiannya Hassan mencoba mengeksplorasi kriteria imkanurrukyat dengan mensistensikan kajian fikih dan astronomi dengan menyesuaikan dengan iklim dan kondisi atmosfer di Indonesia. Hassan berpendapat bahwa kondisi ketebalan atmosfer di Indonesia, dimungkinkan kriteria di Indonesia berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, perumusan kriteria imkanurrukyat Indonesia perlu memperhatikan kondisi atmosfer wilayah Indonesia. Perumusan kriteria imkanurrukyat yang bersifat internasional perlu di kaji lebih mendalam terkait relevansinya di Indonesia, ketika pertimbangan aspek atmosfer perlu diperhatikan. Karena itu, perumusan kriteria imkanurrukyat di Indonesia harus didasarkan lebih banyak pada data-data hasil rukyat di wilayah Indonesia, tetapi tetap memperhatikan data rukyat global.²⁶

Skripsi Anik Zakariah, *Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*. Dalam skripsinya Anik menggali informasi tentang bagaimana Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang terbesar di Indonesia memaknai kata *Ulil Amri* sebagai acuan dalam menetapkan keputusan. Dalam

²⁵Rupi’I Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

²⁶Muhammad Hassan, *Aplikasi Imkanurrukyat Prespektif Fiqih Dan Astronomi*, Makalah Majalah Altahrir Vol. 13 No. 2, 2013

penelitiannya menurut pandangan Muhammadiyah pertama; bahwa ulil amri menurut Muhammadiyah adalah *Ruasā* (pemimpin), *Ulama* (Orang yang berilmu) dan *Umarā* (penguasa), sedangkan untuk hal penentuan awal bulan kamariah, ulil amrinya adalah *Ruasa* (pemimpin).

Pemimpin yang dimaksud bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari ulil amri. Selain itu, ulil amri memiliki batas kewenangan, dalam hal-hal tertentu ulil amri tidak memiliki wewenang sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal karena masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29.²⁷

Sedangkan karya-karya tentang hisab rukyat sangat banyak, diantaranya buku karangan Ahmad Izzuddin dengan judul *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*. Dalam bukunya Ahmad Izzuddin mencoba memberikan wawasan terkait dengan persoalan hisab rukyat khususnya persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawwal, dan Zulhijjah. Disamping itu, dalam buku ini juga mencoba menelusuri kemunculan fiqh hisab rukyat.

Kemudian upaya pembongkaran “simbolisasi” madzhab, yakni “simbolisasi”

²⁷Anik Zakariyah, *Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013

NU sebagai Madzhab Rukyat dan “simbolisasi” Muhammadiyah sebagai madzhab Hisab. Dan sebagai ending dari buku ini, Ahmad Izzuddin mencoba memberi tawaran upaya penyatuan hisab tukyah di Indonesia.²⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berorientasi pada data yang bersifat non-numerik dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang puasa ‘Arafah. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual dan interaksi individu, kelompok, lembaga masyarakat atau suatu sistem sosial.²⁹

Tidak hanya itu penulis juga akan menganalisis faktor-faktor penentu atau yang mempengaruhi proses fatwa Majelis Tarjih mengenai hari ‘Arafah, baik dari sisi sosial dan sisi kriteria sebagai landasan hukum yang dipakai oleh Muhammadiyah.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa

²⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007

²⁹Husaini Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, Hal. 5

hasil wawancara dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari:

1). Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2). Oman Fathurrahman, SW sebagai ahli falak Muhammadiyah, 3). Amiruddin, S.Ag sebagai staf sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Sedangkan untuk data sekunder, penulis menggunakan beberapa dokumen, foto, artikel maupun penelitian yang relevan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara (interview), dokumentasi (*dokumentation*). Wawancara ditunjukkan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah yaitu: 1). Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 2). Oman Fathurrohman, SW sebagai ahli falak Muhammadiyah, 3). Drs. Amiruddin sebagai staf Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Terkait dokumentasi, penulis menukil dari beberapa karya tulis berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun dokumen-dokumen dan segala hal yang berhubungan dengan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hari 'Arafah, juga literatur lain terkait hari 'Arafah menurut pandangan ilmu falak.

4. Metode analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Deskriptif yaitu gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat. Dengan menggunakan analisis deskriptif maka akan digambarkan terlebih dahulu mengenai pemahaman dan pandangan terkait fatwa Majelis Tarjih yang terspesifikasi dalam pelaksanaan puasa ‘Arafah beserta dinamika yang ada di dalamnya.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab kedua berisi tentang Fiqh puasa ‘Arafah dan fatwa. Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang topik dan pokok-pokok pembahasan yang meliputi teori-teori dasar yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam bab ini terdapat dua pembahasan, yang pertama tentang puasa ‘Arafah, yaitu dari pengertian puasa ‘Arafah, dasar hukum, serta hukum melaksanakan puasa ‘Arafah.. Yang kedua fatwa yang meliputi definisi fatwa, kewajiban Mufti serta syarat-syarat Mufti

Bab ketiga berisi anomali fatwa Majelis Tarjih tentang puasa ‘Arafah dari tahun 2003-2015. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai Majelis Tarjih Muhammadiyah, meliputi sejarah, landasan hukum metode

istinbath Majelis Tarjih Muhammadiyah, kedudukan fatwa dalam PP Muhammadiyah, kemudian anomali fatwa Majelis Tarjih tentang puasa ‘Arafah tahun 2003.

Bab keempat berisi analisis anomali fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait analisis terhadap anomali Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang puasa ‘Arafah tahun 2003-2015, dan analisis faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang puasa ‘Arafah tahun 2003.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

FIKIH PUASA ‘ARAFAH DAN FATWA

A. FIKIH PUASA ‘ARAFAH

1. Pengertian dan Dasar Hukum Puasa ‘Arafah

Dalam kitab lughah, nama atau istilah ‘Arafah (عرفات) dapat diklasifikasikan kepada tiga hal¹, pertama nama untuk sebuah tempat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al Aini dan ar-Raghib menyatakan bahwa ‘Arafat adalah:

“Nama bagi tempat yang khusus”. Dalam redaksi ar-Raghib: *“tanah atau daerah yang khusus”*.

Kedua Ibnu Abbas ra. Menjelaskan bahwa nama ‘Arafah berkaitan dengan peristiwa taarufnya antara Nabi dam as dan Hawa di tempat itu. Sebagaimana dinyatakan

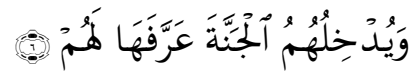
“Dan keduanya taaruf di ‘Arafah, karena itu dinamai ‘Arafah”

Keterangan Ibnu Abbas tersebut dijadikan pijakan oleh para ulama, antara lain Yaqut bin Abdullah al-Hamuwi, Ahmad bin Yahya bin al-Murtadha dan ar-Ragib al-Aṣfahani. Keterangan di atas menunjukkan bahwa kata ‘Arafah untuk nama suatu tempat telah ada sejak zaman Nabi Adam as jauh sebelum disyariatkannya ibadah haji.²

Kedua merupakan nama untuk sebuah tempat yang suci dan dimuliakan, seperti dalam Firman Allah surat Muhammad ayat 6

¹ Abu Hasan Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Maqayisul lughat*, Mesir: Maṭbaatul Madani, cet I, 2008, hlm. 259

² Syarief Ahmad Hakim, *Mengikuti Idul Adha Arab Saudi Dalam Perspektif Syar’i dan Astronomi*, makalah PP PERSIS, hlm 1



dan memasukkan mereka ke dalam jannah yang telah diperkenankan Nya kepada mereka.³

Ketiga, nama untuk hari ke Sembilan (tanggal 9) bulan Zulhijjah sebagaimana dikemukakan oleh:

1. Imam ar-Raghib, al-Baghawi, al-Kirmani dan ar-Razi menyatakan bahwa ‘Arafah adalah *“Nama untuk hari ke-9 dari bulan Zulhijjah”*
2. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa hari tersebut dinamakan ‘Arafah berkaitan dengan peristiwa mimpi Nabi Ibrahim as yang diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dimana pada pagi harinya (hari ke 9 bulan Zulhijjah) Nabi Ibrahim as baru mengetahui bahwa perintah itu benar datang dari Allah SWT. Ibnu Qudamah menyatakan bawa: *“Maka ia mengenal (mengetahui) bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Maka (hari itu) dinamakan hari ‘Arafah.”*

Puasa ‘Arafah dipandang sebagai puasa mandub, sekalipun bagi orang yang melakukan ibadah haji. Dengan catatan, puasa tersebut tidak membuatnya lemah ketika wukuf di ‘Arafah. Jika puasa tersebut membuatnya lemah, hukumnya makruh.⁴ Puasa ‘Arafah merupakan jenis puasa tahunan karena dilaksanakan pada satu tahun sekali yaitu ketika di

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 507

⁴Wahbah Al-Zuhaili, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, *Puasa dan 'Itikaf (kajian berbagai madzhab)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, cet. Pertama, 1995, hlm. 133

bulan Zulhijjah.⁵ Dan hari ‘Arafah merupakan hari yang paling utama, sesuai dengan hadis Muslim;

حدثنا هارون بن سعيد الایلي واحمد بن عيس قال حدثنا ابن وهب اخبرني محرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما ارد هؤلاء⁶

Telah menceritakan Harun bin sa'id al aili dan Ahmad bin 'Isa mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahbi telah mengabarkan kepadaku Mahromah bin Bukayir dari bapaknya berkata aku mendengar Yunus bin Yusuf berkata dari Ibnu Musayyab berkata, 'Aisyah berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan orang dari api neraka selain hari 'Arafah."

2. Dalil-dalil puasa 'Arafah

Adapun dalil dalil hadis tentang puasa 'Arafah adalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang pahala berpuasa 'Arafah sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبدالله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه فقال: رضينا بالله ربا وبالأسلم ديننا وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتي سكن غضبه، فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو قال يصم ولم يفطر، وقال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطبق ذلك احد؟ قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhu Asy-Syafi'i Ala Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi, et al., Jakarta Timur: Penerbit Almahira, cet. II, 2012, hlm. 507

⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 4, 1413 H/1992 M, hlm. 108

السلام, قال كيف بمن يصوم يومًا ويفطر يومين؟ قال وددت اني طوقت ذلك, ثم قال رسول الله ص م: ثلاثة من كل شهر ورمضان الي رمضان فهذا صيام الدهر كله, صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله⁷

Yahya bin Yahya At-Tamimi serta Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Hammad. Yahya berkata, "Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Ghailan, dari Abdullah bin Ma'bad Az-Zimmani, dari Abu Qatadah, ia berkata, seorang laki-laki telah datang menemui nabi saw dan bertanya, "bagaimana engkau berpuasa?" Rasulullah saw menjadi marah mendengar perkataannya. Ketika Umar r.a., melihat kemarahan beliau, maka ia berkata: "kami ridla Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya". Umar terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga kemarahan beliau menjadi reda. Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun?" Nabi menjawab, "Ia belum berpuasa dan tidak pula berbuka". Umar kembali bertanya, "bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari?" Beliau menjawab, "Apakah ada seseorang yang bisa melakukan hal itu?" Umar bertanya, "bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari?" Beliau menjawab, "Itu adalah puasa Dawud Alaihissalam. Umar bertanya, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka dua hari?" Beliau menjawab, "Aku berharap dapat mengerjakannya." kemudian Rasulullah saw bersabda, "Puasa tiga hari setiap bulan, dari Ramadan ke Ramadan lainnya, merupakan puasa sepanjang tahun. Puasa hari 'Arafah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Kemudian puasa hari Asy Syura', aku berharap kepada Allah agar puasa itu bisa menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu.⁸

Mengenai konteks kafarat dosa dua tahun, Al mawardi mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua macam takwil. Pertama, Allah mengampuni dosa dua tahun, kedua Allah memelihara dalam dua tahun itu dari dosa. Lain halnya dengan Asy Syarakhsi dia mengatakan bahwa terhadap dua

⁷ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, *ibid*, hlm. 167

⁸ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, alih bahasa oleh, Agus Ma'mun, Suharlanetal., *Syarah Sahih Muslim*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2012, jilid 5, hlm. 769

tahun yang pertama (tahun yang sudah berlalu) dikafaratkan dosanya. Mengenai tahun kedua, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa apabila dia mengerjakan dosa di tahun kedua, maka puasanya yang telah lalu mengkaffaratkan dosanya. Ada yang mengatakan Allah memeliharanya dari dosa itu.

Sedangkan menurut pendapat pengarang Al Uddah terhadap konteks Allah mengkaffaratkan dosa tahun kedua ada dua pengertian, pertama, mengkafaratkan dosa tahun sebelum tahun yang sedang ditempuh, maka berarti mengkaffaratkan dosa dua tahun yang telah lalu. Kedua, tahun yang akan datang, tetapi tidak ditemukan ada sesuatu ibadah yang menutupi dosa yang akan datang, kalau demikian maka hal ini khusus Rasulullah saja.⁹

Adapun bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji tidak disunatkan berpuasa pada hari ‘Arafah. Bahkan justru disunatkan berbuka pada hari ini, meskipun kuat berpuasa. Hikmahnya, agar dia semakin kuat dalam berdoa, dan mengikuti Sunah Nabawiyah sebagaimana diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani*; Abu Hurairah berkata:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة" [رواه أحمد وابن ماجه وفي صحته نظر]¹⁰

Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw melarang puasa pada hari ‘Arafah di ‘Arafah.

⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm. 355

¹⁰ Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulugul Marom min Adillati Ahkam*, alih bahasa oleh M. Zaenal Arifin, Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, cet. I, 2014, hlm. 245

Namun, madzhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang melakukan ibadah haji boleh berpuasa pada hari ‘Arafah. Dengan catatan, puasanya tidak membuatnya lemah.¹¹

2) Dalam Sunan Kubra An-Nasa’i disebutkan di kitabnya pada

باب النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة

أنا سليمان بن معيد المروز قال حدثنا سليمان بن حرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة¹²

Sulaiman bin Mu‘id al Maruzi memberi kabar kepada kami, dia berkata Sulaiman bin Harbi menceritakan bahwa Rasulullah saw melarang puasa pada hari ‘Arafah di ‘Arafah.¹³

3) Kemudian Hadis dalam kitab sahih Muslim terletak pada

باب استحباب الفري للهاججي يومال ‘Arafah (bab

kesunahan berbuka puasa di hari ‘Arafah)

أخبرنا بن سليم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب والناس ينظرون¹⁴

Artinya: “telah memberi kabar kepada kita semua Ibnu Salim, Ia berkata: telah bercerita kepada kita semua Harmalah, Ia berkata: telah bercerita kepada kita semua Ibnu Wahab, Ia berkata: telah memberi kabar kepada saya Umar bin haris, dari Bukair bin Asyaj, dari Kuraib bin Abbas dari Maimunah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi *shallallahu ‘alaihiwasallam* berpuasa pada hari ‘Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah (berisi

¹¹Wahbah Al-Zuhailly, alih bahasa Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, *Puasa dan Itikaf (kajian berbagai madzhab)*, Bandung: Remaja Rosda karya Offset, cet. Pertama, 1995, hlm. 128

¹² Imam Abi Abdi rohman Ahmad Syu’aib An-Nasa’i, *Assunanul Kubra*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, juz 2, 1991, hlm 155

¹³ Muhammad Nashirudin al Albani, *Sahih Sunan An-Nasa’i*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. I, 2006, hlm. 543

¹⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413 H/1992 M, hlm. 791

susu) dan beliau dalam keadaan berdiri (wukuf), lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya.”

4) Kemudian hadis Ummul Fadhl binti Haris:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ (متفق عليه)¹⁵

Artinya : “Dari UmmulFadhl binti al-Harits, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari ‘Arafah tentang puasa Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam. Sebagian mereka mengatakan, ‘Beliau berpuasa.’ Sebagian lainnya mengatakan, ‘Beliau tidak berpuasa.’ Maka UmmulFadhl mengirimkan semangkok susu kepada beliau, ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya.”

Dari hadis-hadis di atas dijelaskan bahwa sangat dianjurkan berpuasa di hari ‘Arafah sehingga diberikan pahala dilebur dosanya satu tahun yang sudah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Namun, ketentuan dianjurkannya melaksanakan puasa ‘Arafah itu lebih ditunjukkan kepada kaum Muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan bahkan ada hadis yang memakruhkan puasa bagi yang sedang berhaji.

Tidak berpuasa justru lebih utama baginya, berdasarkan riwayat Ummul Fadhl binti harits bahwa dia pernah mengirimkan semangkok susu kepada Nabi saw. yang sedang berdiri di atas punggung untanya di padang ‘Arafah, lalu beliau meminum susu tersebut. Ibnu umar juga menuturkan bahwa dia telah menunaikan haji bersama Nabi saw., kemudian bersama

¹⁵ *Ibid.* Hadis 110-112, hlm. 18

Abu Bakar, lalu bersama Umar, lalu bersama Usman, dan tidak sayu pun dari mereka yang berpuasa pada hari ‘Arafah. Juga, karena puasa pada hari itu membuat tubuh loyo sehingga tidak kuat berdo’a, maka lebih baik ditinggalkan.¹⁶

Ibnu Qayyim dalam *Zadul Ma’ad* berkata sebagaimana yang dinukil oleh T.M. hasbi Ash Shiddiqie:

“Di antara sunnah Nabi, ialah tidak berpuasa pada hari ‘Arafah jika sedang berwukuf. Beliau melarang kita berpuasa pada hari ‘Arafah jika sedang berwukuf. Hal ini dilakukan agar kita lebih kuat berdo’a dan untuk menjelaskan bahwa berbuka di dalam safar lebih utama. Kebetulan juga Nabi berwukuf itu pada hari jum’at, sebagaimana berpuasa khusus hari jum’at saja tidak disukai”. Ibnu Taimiyah berkata: “hari ‘Arafah bagi yang sedang berwukuf merupakan hari raya. Karenanya tidak disukai yang sedang berwukuf berpuasa”¹⁷

3. Puasa ‘Arafah Menurut para Ulama

Dalam literatur kitab-kitab fikih sendiri ditemukan beberapa keterangan mengenai puasa ‘Arafah diantaranya adalah kitab Fathal-Wahhab disebutkan bahwa:

يسنّ صوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحجّ لخبر مسلم صيام يوم عرفة يكفر السنة الذي قبله واللاتي¹⁸

Pada hari ‘Arafah disunnahkan berpuasa, yaitu tanggal 9 Zulhijjah bagi selain orang yang sedang melaksanakan haji. Karena hadis riwayat Muslim: “Puasa pada hari ‘Arafah bisa menghapus (dosa) setahun yaitu tahun yang sebelum dan sesudahnya”.

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *Alfikihul.....*, hlm. 47

¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash SHiddiqi, *Mutiara Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet I, 2003, hlm. 295

¹⁸Zakaria al-Anshari, Fathal-Wahhab, Beirut: Dar al-Fkr, t. th., Juz 1, h.145

Senada dengan keterangan kitab Fathul Wahhab, di dalam kitab Nihayatu Zein juga disebutkan mengenai kesunnahan dan menyebutkan waktu pelaksanaan puasa ‘Arafah ialah tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana dikatakan:

يسنّ (متأكدا) صوم يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع ذي الحجة لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة فقال (يكفر السنة الماضية والمستقبله) وصومه للحجاج خلاف الأولى, ويوم عرفة أفضل الأيام¹⁹

Sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut bahwa puasa ‘Arafah disunnahkan (muakkad), dan puasa ‘Arafah dilaksanakan ketika tanggal 9 bulan Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi “Puasa ‘Arafah menghapus dosa setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang). Adapun melaksanakan puasa ‘Arafah bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji itu menyalahi keutamaan.

Kemudian dalam kitab Fathul Mu‘in juga disebutkan mengenai hukum dan keutamaan puasa ‘Arafah serta waktu pelaksanaannya. Dalam kitab disebutkan:

ويسنّ متأكدا (صوم يوم عرفة) لغير حاج لأنه يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها كما في خبر مسلم وهو تاسع ذي الحجة²⁰

Disunnahkan(sunnahmuakkad) berpuasa pada hari ‘Arafah bagi selain orang yang haji, karena puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang sedang dijalannya dan setahun sesudahnya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim. Hari ‘Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah

Sulaiman bin Manshural Jamal dalam kitabnya Futuhatal Wahhab bi Tauḍih Fathal Wahhab juga mengatakan bahwa:

¹⁹Abi Abdil Mu’ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatu Zein*, Darul Kutub Arabiyah Indonesia, tt, hlm. 195

²⁰Zainuddin al-Malibari, *Fathal-Mu’in pada Tarsyihal-Mustafidin*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th., h. 170

وقد قالوا ليس يوم الفطر أوّل شَوّال مطلقاً بل يوم يفطر النَّاس وكذا يوم التَّحر يوم يضحّي النَّاس ويوم عرفة الذي يظهر لهم أنّه يوم عرفة سواء التَّاسع والعاشر لخبر الفطر يوم يفطر النَّاس والاضحي يوم يضحّي النَّاس رواه التَّرمذيّ وصحَّحه وفي رواية للشَّافعيّ وعرفة يوم يعرف النَّاس ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردّت شهادته يقف قبلهم لا معهم ويجزيه إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه²¹

Para ulama sungguh telah berkata: “Hari raya fitri itu bukan berarti awal Syawal secara mutlak, (namun) adalah hari dimana orang-orang sudah tidak berpuasa lagi, demikian halnya hari nahr adalah hari orang-orang menyembelih kurban, dan begitu pula hari ‘Arafah adalah hari yang menurut orang-orang tampak sebagai hari ‘Arafah, meski 9 dan 10 Zulhijjah, mengingat kutipan hadis: Berbuka (tidak puasa lagi) yaitu hari orang-orang tidak berpuasa dan Idul Adha adalah hari orang-orang menyembelih. Riwayat dari Tirmizi, dan dalam riwayat Syafi‘i: “Hari ‘Arafah adalah hari yang telah dimaklumi oleh orang-orang”. Barangsiapa melihat hilāl sendirian atau bersama orang lain dan ia bersaksi dengannya, lalu kesaksiannya itu ditolak, maka ia harus wukuf sebelum orang-orang, tidak boleh wukuf bersama mereka, dan wukufnya mencukupi (sebagai rukun haji). Sebab yang menjadi pedoman perihal waktu masuk dan keluarnya hari ‘Arafah adalah keyakinannya sendiri.

Dari keterangan pada kitab-kitab fikih seperti yang disebutkan di atas bisa difahami bahwa fukaha lebih cenderung menyebutkan puasa ‘Arafah dengan kalimat “*Wahua Tasiu’ zil Hijjah*” yaitu puasa ‘Arafah adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Secara tekstual dari sini bisa difahami bahwa pelaksanaan waktu puasa ‘Arafah adalah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijjah tanpa ada kaitannya dengan saat jamaah haji wukuf di ‘Arafah.

Mengenai waktu pelaksanaan puasa ‘Arafah apakah berdasarkan jama’ah haji sedang melakukan wukuf di ‘Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah memang terjadi perbedaan pendapat. Diantara sebab bentuk kekauan dan

²¹Futuhatal Wahhab bi Tauḍih Fathal Wahhab, Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th., Jilid II, h. 460

"sikap keras" dalam permasalahan ini adalah anggapan bahwa permasalahan ini telah ada nash yang sifatnya masih global dan memungkinkan untuk diinterpretasikan oleh beberapa kalangan. Andai saja Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (Puasa hari 'Arafah adalah puasa dimana para jam'ah haji sedang wukuf di padang 'Arafah), tentunya ini adalah nash dalam permasalahan ini, dan tentu para ulama tidak akan khilaf dalam memahami redaksi tersebut. Akan tetapi kenyataannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ "Puasa hari 'Arafah...". Disinilah muncul perbedaan dalam memahami sabda Nabi tersebut, apakah maksudnya adalah "hari dimana para jama'ah haji sedang wukuf di 'Arafah"?, atukah yang dimaksud adalah "hari tanggal 9 Zulhijjah, yang dinamakan dengan hari 'Arafah?"

Ulama-ulama terdahulu juga pernah mengutarakan permasalahan kapan puasa hari 'Arafah apakah mengikuti Arab Saudi atau ikut pemerintahan sendiri, diantaranya: Ibnu Rojabal-Hanbali Rahimahullah yang lebih cenderung bahwa hari puasa 'Arafah mengikuti hasil rukyat (ketetapan) Arab Saudi, beliau berkata:

ويوم عرفة هو يوم العتق من النار فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة²²

Dan hari 'Arafah adalah hari pembebasan dari neraka, maka Allah membebaskan dari neraka orang yang wukuf di 'Arafah dan juga orang yang tidak wukuf dari para penduduk kota-kota dari kaum muslimin.

²² Ibnu Rojabal-Hanbali, *Lataiful Ma'arif*, maktabah syamilah

Karenanya jadilah hari setelah hari ‘Arafah adalah hari raya bagi seluruh kaum muslimin di seluruh kota-kota mereka, baik yang menghadiri musim haji maupun yang tidak menghadiri, karena kesamaan mereka dalam pembebasan dari neraka dan ampunan Allah pada hari ‘Arafah".

Sementara itu Ibnu Hajar sendiri menafsirkan hadis:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفْتُ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ (متفق عليه)²³

Dalam memaknai kutipan ((أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ)) ((صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

"Orang-orang (yaitu para sahabat) berselisih tentang puasa Nabi shallallahu 'alaihiwasallam (tatkala di padang ‘Arafah)", Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan :

هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ مُعْتَادًا لَهُمْ فِي الْحَضَرِ ، وَكَأَنَّ مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ صَائِمٌ اسْتَنَدَ إِلَى مَا أَلْفَهُ مِنَ الْعِبَادَةِ ، وَمَنْ جَزَمَ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ قَامَتْ عِنْدَهُ قَرِينَةُ كَوْنِهِ مُسَافِرًا²⁴

"Ini mengisyaratkan bahwasanya puasa hari ‘Arafah adalah perkara yang dikenal di sisi para sahabat, terbiasa mereka lakukan tatkala tidak bersafar. Seakan-akan sahabat yang memastikan bahwasanya Nabi berpuasa bersandar kepada kebiasaan Nabi yang suka beribadah. Dan sahabat yang memastikan bahwa Nabi tidak berpuasa berdalil adanya indikasi Nabi sedang safar"

Kalau dicermati dari hadis di atas dan penafsiran Ibnu Hajar lebih cenderung penamaan puasa ‘Arafah itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa wukuf di ‘Arafah akan tetapi ketika tanggal 9 Zulhijjah. Menurut pandangan yang memahami puasa ‘Arafah adalah ketika tanggal 9 Zulhijjah bukan atas dasar jama’ah haji yang sedang wukuf di ‘Arafah bahwa mengacu pada sejarah bahwa Nabi shallallahu 'alaihiwasallam

²³ Hadis Riwayat Muslim, Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413 H/1992 M, hlm 18

²⁴ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, Beirut: Darul Fikr, tt, juz 4, hlm. 237

hanya berhaji sekali yaitu haji wadaa' dan ternyata Nabi dan para sahabat sudah terbiasa puasa di hari 'Arafah meskipun tidak ada muslim yang wukuf di padang 'Arafah. Ini menunjukan bahwa konsentrasi penamaan puasa 'Arafah berkaitan dengan waktu 9 Zulhijjah dan bukan pada tempat padang 'Arafah yang para jama'ah haji sedang wukuf.

Sementara itu, menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie hal yang terpenting yang harus disepakati oleh kaum Muslim sedunia ialah menentukan tempat yang dijadikan patokan matlak, dan Hasbi mendukung pendapat Abu Zahrah yang menyarankan Makkah dijadikan sebagai pedoman. Hal ini berdasarkan disitulah terletak Ka'bah, padang 'Arafah, Şafa dan Marwa, yang sangat berperan dalam ibadah haji. Maka dari itu, Hasbi Ash-Shiddiqie menafsirkan hadis Nabi yang artinya:

“‘Arafah adalah tempat berkumpul (wuquf) dan hari tasyri’ adalah hari menyembelih hadyu” yaitu:

Menurut Hasbi, hadis ini mengandung makna bahwa hari hari tasyri’ yang tiga hari itu, harus beriringan dengan hari wuquf di ‘Arafah dan berlaku bagi seluruh kaum Muslimin di manapun dia berada. Karena itu, hari-hari tasyri’ ini tidak hanya berlaku bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji saja, tetapi bagi seluruh umat Islam. Sementara itu, Ibnu Abbas menafsirkan frase “Āyamam m‘a dūdāt” (beberapa hari yang terhitung), yang tersebut dalam surat Al-baqarah (2) ayat 203²⁵

²⁵ Al baqarah ayat 203:

dengan hari-hari tasyri'. Ayat ini diturunkan setelah selesai ibadah haji. Itulah sebabnya, dia memberi pengertian bahwa hari tasyri' harus beriringan dengan hari wuquf yang sebenarnya terjadi di padang 'Arafah.²⁶

Dari argumentasi di atas, Hasbi berkesimpulan bahwa hari 'Arafah dan hari tasyri' harus didasarkan pada matlak Mekkah. Maka, tidak pada tempatnya suatu wilayah menetapkan hari-hari itu tidak bersamaan dengan hari-hari yang persis terjadi di Mekkah. Pada akhirnya Hasbi menyarankan kalau belum mungkin kaum Muslimin bersepakat mengambil rukyat Mekkah sebagai pedoman yang berlaku bagi seluruh dunia Muslim, setidaknya mereka mengambil rukyat yang dikukuhkan oleh hisab ibu kota masing-masing negara.²⁷

Sedangkan KH. A. Gozali Masroeri (Ketua Lajnah Falakiyah PBNU) memberikan argumentasinya bahwa kesunnahan puasa 'Arafah bukan didasarkan adanya wukuf, tetapi karena datangnya hari 'Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka bisa jadi hari 'Arafah di Indonesia berbeda

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, Maka tiada dosa baginya. dan Barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), Maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Tafsir Al Quran, Jakarta: Bulan Bintang, 1997, hlm. 29

²⁶ Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, tt. hlm. 66

²⁷ *Ibid*, hlm. 66

dengan di Saudi Arabia. Toleransi terhadap adanya perbedaan ini didasarkan atas hadis Sahabat Kuraib berikut ini:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ كُرَيْبٌ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ²⁸

“Dari Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib, bahwa UmmulFadl binti al-Harits mengutus Kuraib menemui Mu’awiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku tiba di Syam. Lalu aku tunaikan keperluan Ummulfadl. Dan terlihatlah hilāl bulan Ramadan olehku, sedang aku masih berada di Syam. Aku melihat hilāl pada malam Jum’at. Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, dan ia menyebut hilāl. Ia berkata: “Kapan kamu melihat hilāl?” Aku berkata: “Malam Jum’at.” Dia bertanya: “Apakah kamu sendiri melihatnya?” Aku menjawab: “Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa, demikian juga Mu’awiyah.” Dia berkata: “Tetapi kami melihat hilāl pada malam Sabtu, maka kami tetap berpuasa sehingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihat hilāl”. Aku bertanya: “Apakah kamu tidak cukup mengikuti rukyatMu’awiyah dan puasanya?” Lalu dia menjawab: “Tidak, demikianlah Rasulullah SAW menyuruh kami,” (HR. Muslim)

Berdasarkan dalil di atas maka rukyatul *hilāl* atau observasi bulan sabit untuk menentukan awal bulan Kamariah atau Hijriah berlaku rukyat nasional, yakni rukyat yang diselenggarakan di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum.²⁹ Tentunya hal ini sesuai dengan apa yang jadi pedoman penentuan awal bulan Kamariah di kalangan Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman “Penentuan Awal

²⁸ Lihat dalam Al Hafid Jalil Abi Bakr Ahmad bin Husain Bin Ali Al Baihaqi, *al Sunan al Kubro*, Juz IV, Beirut : Darl Fikr, t.t., hlm. 251.

²⁹ <http://www.elhooda.net/2014/09/puasa-‘Arafah-didasarkan-wukuf-atau-hari-‘Arafah-9-Zulhijjah/> diakses pada Rabu, 11 November 2015, pk1. 14:00

bulan Kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)”³⁰ dalam buku itu disebutkan bahwa rukyat yang dianut oleh NU didasarkan atas hasil dari penyelenggaraan rukyatul *Hilāl bilfi’li* di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilāl di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan Saudi Arabia. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kesunahan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah bukan didasarkan adanya wukuf, tetapi karena datangnya hari ‘Arafah.³¹

Adapun Hikmah dari disyariatkannya puasa ‘Arafah, yaitu:

1. Ketika manusia menunaikan kewajiban, mungkin saja ada kekurangan-kekurangan yang tidak membatalkan kewajiban, akan tetapi tidak memenuhi syarat kesempurnaannya yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebagai penyempurnaan kewajiban, memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah, dan menutup kekurangan-kekurangan yang mungkin ada, Allah mensyari’atkan puasa sunnah agar puasanya benar-benar dapat mensucikan dan menjernihkan semua kotoran.
2. Dan dengan disunahkannya puasa ‘Arafah, hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu orang yang berpuasa pada hari itu supaya berfikir mengenai orang-orang yang berada di tanah ‘Arafah untuk memenuhi panggilan Allah dan

³⁰ Lihat A. Ghazalie Masroeri Lajnah Falakiyah PBNU, *Penentuan Awal Bulan kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama*, tt., td., Bagian ke VI hlm. 20

³¹ *Ibid.* hlm. 22

meminta ampun serta rahmat-Nya. Sehingga, ia rindu kepada tempat-tempat yang suci itu. Dengan cara demikian ia bersekutu dengan para haji dalam menerima pahala dan rahmat yang diturunkan kepada mereka. Dari puasa ini ia menerima pahala dan balasan yang besar.³²

4. Puasa ‘Arafah Perspektif Astronomi

Sebagai ibadah yang masuk dalam bulan Zulhijjah dan pelaksanaannya berkaitan dengan prosesi ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, tentu secara astronomis hal ini berkaitan dengan adanya konsep garis tanggal. Menurut Thomas Djamaluddin³³ waktu pelaksanaan puasa ‘Arafah tidak terlepas dari adanya dua sistem kalender yang kita anut, *syamsiah* (*solar calender*³⁴) dan *kamariyah* (*lunar calender*)³⁵, menyebabkan kita akan menghadapi dua garis tanggal: garis tanggal *syamsiah* dan garis

³²Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatu Tasr'i Wafalsafatuhu terjema Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*", Semarang: Asy-Syifa, tt, td, hlm. 196

³³ Adalah seorang Astronom dan pemerhati hisab dan rukyat, lahir di Purwokerto tanggal 23 jaanuari 1962 M/17 Sya'ban 1381 H. Gelar sarjana diperoleh dari jurusan astronomi ITB. Menyelesaikan program S2 dan S3 di Departement of Astronomy Kyoto University, Jepang. Ia aktif dalam pertemuan hisab rukyat baik nasional maupun internasional. ia juga salah satu anggota *Islamic Crescent's Observation Project (ICOP)* di Jordan. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi....*, hlm. 215

³⁴Kalender syamsiah atau solar calender ialah kalender yang mengacu pada sistem perhitungan waktu yang berdasarkan pada pergerakan relatif bumi terhadap matahari. Kalender syamsiah biasa disebut dengan *Kalender Masehi* atau *Kalender Miladiyah*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III, 2012, hlm. 121

³⁵ Kalender Kamariah biasa disebut Kalender Hijriah atau Kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan bulan terhadap bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtima matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan bulan (*moonset Rafter sunset*), pada saat itu posisi hilāl di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi....*hlm. 118

tanggal kamariah. Garis tanggal mesti ada karena bumi kita bulat sehingga perlu pembatas pergantian hari.³⁶

Garis tanggal syamsiah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional yang menjadikan garis bujur 0 derajat melalui Greenwich dan garis bujur 180 derajat melalui lautan Pasifik. Di sebelah Timur garis tanggal internasional tanggalnya lebih muda daripada yang di sebelah baratnya. Contoh yang paling baik adalah catatan sejarah penyerangan Jepang kepada tentara sekutu. Kejadiannya sama, tetapi buku-buku sejarah di Amerika menyebutnya penyerahan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Sedangkan buku-buku di Asia, termasuk di Indonesia, menyebutkan tanggal 15 Agustus 1945. Garis tanggal kamariah pun sama sifatnya seperti garis tanggal internasional. di sebelah Timur garis tanggal kamariah tanggalnya pun lebih muda daripada di sebelah baratnya. Bedanya, garis tanggal kamariah tidak tetap pada garis bujur tertentu. Posisinya selalu berubah setiap bulannya, tergantung posisi bulan dan matahari.³⁷

Ada dua definisi yang saat ini digunakan dalam pembuatan garis tanggal kamariah. Pertama, berdasarkan *visibilitas hilāl* seperti yang dilakukan oleh IICP (*Internasional Islamic Calender Programme*, berpusat di Malaysia)³⁸. Dan yang kedua, berdasarkan syarat minimal

³⁶ Thomas Djamaluddiin, *Menggagas Fikih Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan hari Raya)*, Penerbit Kaki Langit, cet. I, 2005, hlm.

³⁷ *Ibid*, hlm. 12

³⁸ IICP (*Internasional Islamic Calender Programme*) Didirikan untuk wadah usaha-usaha penyatuan kalender Islam. Program ini bermarkas di Universiti Sains Malaysia (USM) Penang. Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...* hlm. 93

bulan di horizon pada saat matahari terbenam. Cara yang kedua yang biasanya digunakan di Indonesia. Cara ini pun yang paling sederhana, namun cukup baik untuk menjadi baik untuk menjadi kriteria pertama mengkonfirmasi rukyatulhilal.³⁹

Oleh karena itu, mengenai kasus perbedaan waktu antara Arab Saudi dengan di Indonesia dalam melaksanakan puasa ‘Arafah. Menurut Thomas Djamaluddin ada satu prinsip yang harus diingat dalam penentuan waktu ibadah; penentuan secara lokal. Wukuf di ‘Arafah ditentukan berdasarkan penentuan awal Zulhijjah di Arab Saudi. Awal Ramadan ditentukan berdasarkan rukyatul hilāl di masing-masing wilayah. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi Matahari di masing-masing tempat. Demikian pula waktu untuk melakukan puasa-puasa sunah, termasuk puasa hari ‘Arafah, 9 Zulhijjah. Tidak bisa diganti menjadi tanggal 8 Zulhijjah hanya karena alasan perbedaan tanggal syamsiahnya.⁴⁰

B. FATWA

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi, kata fatwa mempunyai makna petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa sendiri berasal dari bahasa Arab “*al-fatwa*”. Bentuk jamaknya adalah *fattawin* dan *fataway*.⁴¹ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam*, secara terminologi fatwa adalah suatu pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *faqih* sebagai

³⁹ *Ibid*, hlm. 13

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 15

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir al-Qur’an, 1973, hlm. 308

jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁴²

Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya “Al Kasyaf” pengertian fatwa menurutnya adalah jalan lurus yang lempeng atau lurus. Sedangkan fatwa menurut ahli syari’at ialah suatu penjelasan hukum syar’iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.⁴³ Amir Syarifuddin⁴⁴ mendefinisikan fatwa yaitu sebagai penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Fatwa sendiri dalam kajian hukum Islam bersifat tidak mengikat. Maksudnya adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan mengamalkan isi fatwa, atau bisa menolak dan tidak mengamalkannya. Orang atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa disebut sebagai *Mufti*. Sedangkan orang atau pihak yang meminta fatwa disebut *Mustafti*, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut *Mustafta fih* atau *fatwa*.⁴⁵

2. Syarat-syarat Mufti

⁴² Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid i, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997, h. 326

⁴³ Rohadi Abd. Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1991, hlm. 7

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, 1999, hlm. 429

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul....* hlm, 429-430

Menurut Ibnu Qayyim, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mufti adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridlaan Allah semata-mata. karenanya janganlah memberi fatwa untuk mencari kekayaan atau kemegahan, atau karena takut kepada penguasa. Telah berlaku sunnah Allah memberikan kehebatan di mata manusia kepada orang yang ikhlas, kepadanya di berikan nur (cahaya) dan memberikan kehinaan kepada orang yang memberikan fatwa atas dasar riya.
2. Hendaklah dia mempunyai ilmu, ketenangan, kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan. Ilmulah yang sangat diperlukan dalam memberi fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksaan Allah.
3. Hendaklah mufti itu seorang yang benar-benar menguasai ilmunya, bukan seorang yang lemah ilmunya, karena apabila dia kurang pengetahuan mungkin dia tidak berani mengemukakan kebenaran di tempat dia harus mengemukakannya dan mungkin pula dia nekat mengemukakan pendapat di tempat yang seharusnya dia diam.
4. Hendaknya mufti itu seorang yang mempunyai kecukupan dalam bidang material, bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang untuk menegak hidupnya, karena dengan

⁴⁶ T.M. Hasby Ash Shidiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 167

bantuan orang lain, niscaya akan rendahlah pandangan orang kepadanya.

5. Hendaklah mufti itu mengetahui ilmu kemasyarakatan. Apabila sang mufti tidak mengetahui keadaan mungkinlah dia menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya itu.

3. Fatwa, Qaḍa, dan Ijtihad.

Sebelum mengetahui sejauh mana korelasi antara fatwa dan ijtihad, maka kita pahami terlebih dahulu mengenai ijtihad. Adapun kata *ijtihad* sendiri merupakan derivasi dari kata “*jahada*” yang berarti “mencurahkan segala kemampuan” atau “menanggung beban”. Sedangkan secara etimologi, ijtihad ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.⁴⁷

Sedangkan pengertian ijtihad secara istilah pada umumnya banyak dikemukakan dalam buku-buku ushul fikih, yaitu pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Sebagaimana yang diartikan Abu Zahra mengartikan ijtihad yaitu:

بذل الفقيه وسعة في استنباط الأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية⁴⁸

“pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam menetapkan (istinbath) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci”

Mengenai batasan-batasan ijtihad, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah masalah hukum yang sudah ditetapkan dengan dalil-dalil yang *qath'i as-subut* (pasti

⁴⁷Luwis Ma'ruf, *al-Munjdifal-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hlm. 105-106

⁴⁸Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih*, Damaskus: Daaral-Fikr, tt, hlm. 379

penyampiannya) dan *qaṭ'i dalalah* (pasti pula tunjukan kandungannya) seperti kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, pengucapan dua kalimat syahadat, jarimah zina, minum khamar, pembunuhan dan pembatasan hukum yang telah ditentukan. Semua itu dapat didapatkan dari al-Quran dan sunnah yang memaparkannya dengan tegas. Sedangkan yang merupakan lapangan ijtihad, menurut Wahbah Az Zuhaili adalah nash-nash hukum dalam bentuk yang tidak pasti baik penyampiannya maupun tunjukan kandungannya. Disamping itu, masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak ada landasan *nash*-nya.⁴⁹

Fatwa dan ijtihad merupakan dua hasil pemikiran para ulama ahli fikih Islam yang patut kita pertahankan sepanjang masa, sebab dua hal ini senantiasa memberikan warna terhadap perubahan atau perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Yusuf Qarḍawi mengatakan bahwa pada dasarnya mengeluarkan fatwa dan melakukan ijtihad merupakan usaha raksasa yang dapat dilakukan oleh para ahli di bidangnya masing masing. Sehingga pada hakikatnya tidak hanya ahli dibidang fikih Islam saja yang boleh melakukan fatwa/ijtihad, melainkan para ahli ilmu pengetahuan umum pun sangat boleh melakukan fatwa dan ijtihad sesuai dengan disiplin ilmu mereka.⁵⁰

Sehingga mengenai fatwa dan ijtihad dari definisi dan substansinya dapat disimpulkan bahwa fatwa itu merupakan hasil ijtihad para ahli

⁴⁹Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, PenerbitAmzah, cet. I, 2005, hlm. 114

⁵⁰Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama, 1991, h. 40

(mujtahid dan mufti) yang dapat saja dilahirkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bentuk tulisan dan lisan para ulama itulah yang kita kenal dengan fatwa-fatwa keagamaan yang berharga untuk kepentingan umat manusia. Oleh karenanya, kaitan ijtiha dengan fatwa sangat erat sekali, sebab ijtiha itu merupakan usaha maksimal para ahli untuk mengambil atau mengistimbatkan hukum-hukum tertentu, sehingga fatwa itu hasil daripada ijtiha itu sendiri.⁵¹

Seperti yang diketahui bahwa hukum Islam sendiri berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtiha para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para Mufti. Oleh karena fatwa merupakan hasil daripada usaha para mujtahid/mufti maka sudah barang tentu posisi fatwa sangat memperkuat tindakan berijtiha. Sebab fatwa dihasilkan dari ijtiha para ulama, sehingga apabila tidak ada ijtiha kemungkinan besar tidak akan muncul atau lahir fatwa keagamaan yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan.⁵²

Maka dari itu, Fazlur Rahman mengatakan bahwa “fatwa dan ijtiha mempunyai kaitan erat sekali, dimana diantara keduanya saling melengkapi. Sebab secara hakiki ummat manusia (umat islam) di bawah pengaruh dan semangat (bukan berdasarkan pengertian harfiah saja) yang

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid.*

mendorong kepada nabi untuk beraksi di dalam suatu teori tertentu, berhak menafsirkan dan memberikan arti baru kepada wahyu Allah.⁵³

Di sisi lain, fatwa dan ijtihad terdapat perbedaan. Menurut Wahbah Zuhaili, perbedaan antara fatwa dengan ijtihad terletak pada obyek yang akan dijawab. Fatwa lebih khusus daripada ijtihad, di mana ijtihad merupakan proses penggalian suatu hukum atas persoalan baik yang sedang terjadi maupun yang belum terjadi. Sedangkan fatwa hanya terbatas pada persoalan yang sudah terjadi yang oleh *faqih* diketahuinya hukumnya.⁵⁴

Sedangkan pengertian dari *Qada* adalah memutuskan hukum atau membuat sesuatu ketetapan yang oleh istilah fikih *al-Qada* disebut sebagai lembaga hukum.⁵⁵ Antara fatwa dan *Qada* terdapat perbedaannya yaitu; *pertama* dilihat dari ruang lingkup masalahnya; fatwa meliputi persoalan yang luas, sedangkan *Qada* hanya terbatas pada persoalan yang ditangani yaitu sesuai dengan kewenangan hakim berdasarkan perundangan. Dalam hal lain, fatwa dapat diberikan kepada siapa saja. Sedangkan *Qada* hanya dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan putusan tersebut terhadap suatu permasalahan.⁵⁶ *Kedua*, dilihat dalam hal efeknya; keputusan seorang *Qada* (hakim) harus dilaksanakan, tidak ada pilihan untuk menolaknya. Akan tetapi, keputusan itu hanya mengikat terhadap

⁵³Lihat Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984, hlm. 27

⁵⁴Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fikhi al-Islami*, Juz 2, Beirut: Dar alFikr, 1986, hlm. 1156

⁵⁵T.M. HasbiAs-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 33-34

⁵⁶Departemen Agama RI, *Ushul Fikih 2*, t.t.: Departemen Agama RI, t.th., h. 177

pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan fatwa tidak mengikat. *Mustafti* boleh memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan fatwa. Tidak ada daya ikat atau unsur paksaan dalam melaksanakannya.⁵⁷ Ketiga, dilihat dari pembatalan hukumnya; keputusan hakim dapat membatalkan fatwa sedangkan fatwa tidak dapat membatalkan putusan hakim.⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

BAB III

ANOMALI FATWA TENTANG PUASA ‘ARAFAH DAN PENETAPAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH

A. Sekilas Tentang Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 November 1912 Masehi di kota Yogyakarta.¹ Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sekitar akhir abad 19 dan awal abad 20. Gagasan berdirinya Muhammadiyah merupakan jawaban dari pergolakan peradaban Islam yang ditandai dengan memudarnya pengaruh imperium Islam di Turki, kolonialisme di daerah Hindia Belanda, keadaan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi umat yang miris, serta dominansi Wahabi di Semenanjung Arab.²

Menurut Weinata Sairin, tak disangkal lagi bahwa pendirian Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan Islam yang terbesar di Indonesia. Dengan bertolak dari kenyataan besarnya jumlah anggota gerakan ini yang terbesar tidak hanya di Indonesia saja, namun juga tumbuh di beberapa negara lain, seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain.³

¹ Syamsul Hidayat dkk, *Study Muhammadiyah : Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm 29

² Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2010, Cet. Pertama, hlm. 7.

³ Wienata Sairin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 18

Di samping itu, pendirian Muhammadiyah ini didasarkan pada pertimbangan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Organisasi Budi Utomo membantu Muhammadiyah untuk mendapatkan pengakuan dari pihak kolonial Belanda, mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri.⁴ Ahmad Dahlan merupakan tokoh sentral dalam pembentukan Muhammadiyah, membawa pemikiran reformis dengan harapan dapat mengembalikan semangat beragama yang sesuai dengan tuntunan dari al Quran maupun hadis sehingga tercapai efisiensi sistem sosial, tujuan kehidupan yang jelas serta efektifitas agama yang melingkupi setiap individu.⁵

Berdirinya Muhammadiyah merepresentasikan keinginan untuk maju, merdeka dan mandiri dalam wadah organisasi. Pertengahan abad ke-18 gerakan reformasi Islam mendapatkan perhatian tersendiri. Penyemaian pemikiran rasional reformis didukung dalam bingkai pemikiran yang dimulai dari *Rifa'at at-tahtawi* dan *at-tunisi*.⁶

Dari segi kelembagaan Muhammadiyah mempunyai berbagai macam lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan di masyarakat. Muhammadiyah memiliki 13 majelis dengan membidangi permasalahan yang berbeda, diantaranya; Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tablig, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan

⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, Cet. Kedua, hlm. 152.

⁵ Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1990, Cet. Pertama, hlm. 315

⁶ Hery Sucipto, *KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah*, Jakarta : Best Media Utama, 2010, Cet. Pertama, hlm. 33

Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat serta Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.⁷

Selain itu ada beberapa lembaga yang terdiri dari Lembaga Amal Zakat Infak dan Shadaqah, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan.⁸ Selain itu Muhammadiyah juga mempunyai 7 organisasi otonom yang terdiri atas Tapak Suci, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Aisyiah, *Nasyi'atul Aisyiah* dan *Hizbul Watan*.⁹

B. Majelis Tarjih sebagai Lembaga Fatwa

1. Sejarah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang

⁷<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html> Diakses pada pukul 07.56 wib, tanggal 27 November 2015

⁸ *Ibid.*

⁹ Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *Ibad...*, *op. cit.*, hlm. 107-109.

pertama. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah *khilafiyat* karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.¹⁰

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934). Pada kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiah.¹¹

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyr'i, Tanfîz dan Taftisiyî. Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Haliniharus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Jakarta :Logos Publishing House, 1995, hlm 64

¹¹ Imron Rosyadi, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Telaah Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Penelitian Insentif Reguler Kompetitif Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, hlm. 10

Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian. Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh karena pentingnya gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga *Manhaj Tarjih* atau Qaidah Tarjih belum dibuat, Ini berarti bahwa Majelis Tarjih belum dapat bekerja sebagai organisasi.¹²

Arti dari Majelis Tarjih itu sendiri secara pengertian bahasa terdiri atas dua kata, yaitu Majelis dan Tarjih. Majelis berarti dewan, sedangkan tarjih dalam term *uṣul al-fikih* adalah mengukuhkan salah satu dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari dalil yang lain.¹³ Dalam lingkungan Muhammadiyah pengertian tarjih telah mengalami pergeseran makna dari makna asli dalam disiplin usul fikih. Dalam Muhammadiyah, karena kenyataan praktis, dengan tarjih tidak hanya diartikan kegiatan sekedar kuat-menguatkan suatu dalil atau pilihmemilih di antara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas

¹²*Ibid*, hlm. 11

¹³Rupi'i Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria Wujud al-Hilāl dan Konsep Matlak)*, Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2012, hlm. 71

sehingga identik atau paling tidak hampir identik dengan kata ijtihad itu sendiri. Dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama agama Islam. Oleh karena itu bertarjih artinya sama atau hampir sama dengan melakukan ijtihad mengenai suatu permasalahan dilihat dari perspektif Islam.¹⁴

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan puasa dan penetapan awal bulan kamariah. Fungsi inti dari Majelis Tarjih dan Tajdid adalah menetapkan keputusan atau memastikan hukum tentang masalah yang menjadi topik perbedaan masyarakat Muslim di Indonesia.¹⁵

Jadi Majelis Tarjih adalah badan atau dewan yang berwenang melakukan kegiatan penetapan hukum melalui prosedur pemilihan salah satu pendapat di antara beberapa pendapat yang dalilnya lebih kuat.¹⁶

2. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih

Adapun fungsi dan tugas Majelis Tarjih ini diilhami oleh ayat QS Al-Nur (24): 51 yang artinya:

“Hanya sesungguhnya sambutan diajak kepada Allah dan pernyataan orang-orang mukmin itu apabila utusannya untuk menegakkan hukum diantara mereka tentulah mereka berkata: “Kami mendengar dan kami mengingat dan mereka itulah yang berharga”¹⁷

¹⁴ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*, “Universitas Muhammadiyah Surabaya”, dalam Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid, pdf. Hlm.4

¹⁵ Agus Purwito, *Majlis Tarjih Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentar*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 76.

¹⁶ Rupi'i Amri, *Dinamika....*, hlm. 71

¹⁷ Yusuf M. Yunan dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 381

Secara rinci mengenai tugas pokok Majelis Tarjih sebagaimana diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 594/jo th. 1954 yang disempurnakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1 th. 1961:

1. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
2. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukum hukum Islam ke arah yang lebih maslahat.
4. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
5. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta atau tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.¹⁸

Tugas pokok Majelis Tarjih tersebut disempurnakan lagi dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 yakni;

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurnian.

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyat Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, hlm. 117

2. Menyusun tuntunan, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah.
3. Memberikan fatwa dan nasihat baik atas permintaan ataupun tarjih memandang perlu
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan pusat persyarikatan.¹⁹

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 disempurnakan lagi oleh Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 74/SK/1-A/8.C/1993 yang menyatakan bahwa:

1. Mempercepat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan Tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan, serta membimbing umat, khususnya keluarga dan anggota Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.

¹⁹ *Ibid.*

4. Membantu pimpinan persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahah.²⁰

3. Pola Penetapan Fatwa Majelis Tarjih

Sebagai lembaga ijtihad, objek penelitian Majelis Tarjih mencakup dua hal, yaitu: masalah khilafiyat yang hukumnya diperselisihkan oleh ulama madzab dan masalah-masalah kontemporer yang belum ada hukumnya. Dalam proses tarjih maupun istinbat hukum baru atas permasalahan kontemporer Muhammadiyah berpegang pada sumber hukum pokok al-Qur'an dan Sunah. Muhammadiyah tidak mendasar pada pendapat salah satu imam madzab namun menggali ataupun mentarjihkan hukum berdasarkan dalil Qur'an maupun Sunah yang dinilai lebih kuat serta paling sahih jalur periwayatannya.²¹

Berdasarkan Keputusan Munas Tarjih XXV tentang manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan tiga jenis ijtihad yaitu *ijtihad bayani*²², *ijtihad qiyas*²³ dan *ijtihad ishtilahi*²⁴ dalam

²⁰ *Ibid.*

²¹ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 96-97

²² maksud dari *ijtihad bayani* sendiri yaitu usaha mendapatkan hukum dari *nash-zhani* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Lihat Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, cet. IV, 2007, hlm 97

²³ *ijtihad qiyasi*, ialah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya, berdasarkan kesamaan *illah*. Lihat Asjmuni, *ibid.*

²⁴ *ijtihad istislahi* adalah mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai, Lihat Asjmuni, *Ibid.*

menetapkan sebuah keputusan.²⁵ Selain itu, sistem ijtihad yang diterapkan adalah *ijtihad jam'i* dimana pembahasan terhadap hukum bersifat kolektif yang dibahas dalam sidang muktamar Muhammadiyah oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dari beberapa bidang keilmuan, sehingga sistem pengambilan keputusan atas masalah khilafiyah maupun kontemporer diputus secara musyawarah.²⁶

Hingga kini, telah banyak fatwa sebagai produk ijtihad dari Majelis Tarjih dan Tajdid, diantaranya mengenai: aqidah, sholat, puasa, zakat, haji, zikir dan doa serta masalah kontemporer seperti keharaman rokok, batas-batas kesenian, hukum bayi tabung, nikah beda agama, persoalan hisab rukyat dan lain-lain.²⁷

Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, yang dikaji hukumnya selalu mendasarkan pada dalil pokok al-Quran dan al-Sunnah. Hal ini secara tegas dituangkan sebagai hasil Muktamar Khusus, yang membicarakan Masalah Lima²⁸. Muktamar tersebut berlangsung pada akhir bulan Desember 1954 sampai dengan awal bulan Januari 1955, setelah dipersiapkan materinya selama lebih dari 15 tahun, mengingat adanya perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan di Indonesia.²⁹

²⁵ Lihat Keputusan munas tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, hlm. 8

²⁶ Arbiyah Lubis, *Pemikiran.....* hlm. 92-93

²⁷ <http://www.fatwatarjih.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 11.20 WIB

²⁸ Kitab Lima ini memuat penjelasan mengenai lima bidang persoalan, yaitu masalah Agama, Dunia, Ibadah, Sabilillah, dan Qiyas. Untuk lebih lengkapnya lihat di Himpunan Fatwa Tarjih Muhammadiyah, pdf, hlm 134-137

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, cet. IV, 2007, hlm. 97

Dalam rumusan tentang *al-Dienul Islam*, dinyatakan: “*Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Qur’an (maksudnya al-Quran) dan yang tersebut dalam Sunnah (maksudnya al-Sunnah yang shahih)*. Dari pernyataan ini dapat di ambil pengertian bahwa sumber pokok Agama Islam menurut Muhammadiyah adalah al-Qur’an dan al-Sunnah, lebih tegas lagi (sekalipun tidak menggunakan al-Sunnah, tetapi hadis yang asli teks keputusannya dalam bahasa Arabnya adalah “*al-Hadis al Syarif*”³⁰

C. Fatwa Puasa ‘Arafah Majelis Tarjih PP Muhammadiyah

Sebelum pembahasan fatwa mengenai puasa ‘Arafah, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa terdapat 3 produk Majelis Tarjih, yaitu;³¹

1. Putusan

Putusan itu sifatnya formil mengikat kepada warga, anggota maupun organisasi. Sedangkan forum yang mengambil putusan adalah adalah Musyawarah, dan yang membuat putusan adalah Munas Tarjih Nasional. Adapun produk dari Musyawarah Nasional Tarjih dinamakan dengan Putusan Tarjih. Putusan ini bersifat Nasional dalam arti berlaku bagi seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia. Dalam mengambil putusan forum Musyawarah berangkat dari sebuah mekanisme besar dan waktu pelaksanaannya juga tidak setiap tahun yaitu dua kali atau minimal sekali setiap satu periode muktamar dimana dalam pelaksanaannya kadang-kadang berdiri sendiri kadang kadang

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wawancara dengan Syamsul Anwar sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah periode 2010-2015 di Ruang Dosen Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Selasa 8 Desember 2015 pukul 11.25 WIB.

dilakukan bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah³². Maka dari itu putusan ini sifatnya formil dan mengikat bagi semua warga Muhammadiyah. Putusan tarjih dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih, dahulu namanya Muktamar Tarjih. Peserta Munas sendiri yang terdiri dari Ulama dan cendekiawan Muhammadiyah disebut sebagai Anggota Tarjih. Komposisinya terdiri dari personil Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan utusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Se-Indonesia.

2. Fatwa

Fatwa sendiri sebagai sebuah produk di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sifatnya tidak mengikat seperti halnya putusan. Tetapi tetap mencerminkan pandangan Muhammadiyah dalam suatu permasalahan agama. Sebagai produk ijtihad dari Majelis tarjih fatwa memungkinkan untuk mengalami perubahan, dalam prosesnya fatwa di Majelis Tarjih keluar sekitar 2 minggu sekali.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fatwa itu secara hierarki berada di bawah putusan nasional tarjih, maka fatwa tidak boleh berbeda dengan putusan tarjih. Maka dari itu menurut Syamsul

³²Dalam disertasi Rupi'i Amri disebutkan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih yang dilaksanakan bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah misalnya pada Munas tarjih ke 25 tahun 2000 di Jakarta, sedangkan Munas Tarjih yang dilaksanakan berdiri sendiri (di luar Muktamar Muhammadiyah) adalah Munas Tarjih ke 26 pada tanggal 1-5 Oktober 2003 di Padang dan Munas Tarjih ke 27 pada tanggal 1-5 April 2010 di Malang. lihat Rupi'i Amri *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria Wujud al-Hilāl dan Konsep Matlak)*, Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2012, hlm. 97

Anwar sebagai implikasinya ketika terdapat perbedaan antara fatwa dan putusan tarjih tentu putusan tarjih yang diambil, namun apabila ada warga Muhammadiyah yang mengamalkan fatwa tersebut yang tidak disetujui oleh keputusan munas tarjih nasional maka itu sah-sah saja, akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut tidak boleh mengatasnamakan sebagai bagian dari warga Muhammadiyah, dalam arti fatwa tersebut hanya untuk diamalkan oleh pribadi dan tidak boleh mengajak orang lain untuk mengikutinya.³³ Fatwa Majelis Tarjih umumnya dimuat di dalam Majalah Suara Muhammadiyah yang kemudian akan dijadikan buku Fatwa-fatwa Tarjih: tanya Jawab Agama setelah fatwa tersebut dibahas di forum Musyawarah Nasional Tarjih.

3. Wacana

Sedangkan yang terakhir dari produk Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yaitu wacana, merupakan pengembangan pemikiran dalam soal keagamaan yang bersifat tidak mengikat secara kelembagaan, diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal.³⁴

Fatwa Majelis Tarjih mengenai puasa 'Arafah pernah dikeluarkan pada tahun 2003 oleh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada saat itu. Fatwa tersebut dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah rubrik Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah No. 16 tahun 2003, sebelumnya terdapat pertanyaan dari warga Muhammadiyah atas nama H.

³³ Hasil wawancara dengan Syamsul Anwar

³⁴ <http://www.fatwatarijih.com/2015/03/doa-iftitah.html> diakses pada hari Minggu, 13 Desember 2015

Amin, BA. Dari Kajian Krowe Lambeyan Magetan kepada Majelis Tarjih dengan redaksi sebagai berikut:

“Bagaimana hukum puasa ‘Arafah yang tidak bertepatan dengan wukufnya jama’ah haji?”

Kemudian jawaban dari Majelis Tarjih sebagai berikut:

“pertanyaan saudara singkat, tetapi jawabannya agak sedikit panjang, karena ada aspek yang menyangkut ijtihad, dimana sama-sama kita ketahui bahwa “ijtihad itu tidak gugur oleh ijtihad”. Di samping itu, ijtihad sekalipun tidak tepat (benar), tapi mendapat satu pahala bagi orang yang berijtihad, begitu juga yang mengikutinya.

Kalau kita merujuk kepada sunnah, Nabi saw menyuruh kita yang tidak sedang melakukan ibadah haji, sunnah berpuasa pada hari wukuf, seperti disebutkan dalam hadis berikut;

صوم عرفة يكفر سنتين ماضية أو مستقبلية (رواه الجماعة)

Artinya: “puasa ‘Arafah dapat menutup (menghapus dosa) setahun yang lalu dan setahun yang akan datang”. (HR Al jama’ah)

Menurut hadis tersebut kita harus berpuasa pada waktu para hujjaj sedang wukuf di ‘Arafah, bukan pada hari sesudah wukuf. Hal ini tidak ada kesulitan jika kita menggunakan “matlak’ Makkah” dalam penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawwal, dan 1 Zulhijjah. Tetapi, lembaga Itsbat Departemen Agama, begitu juga ormas-ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia, memakai matlak’ wilayah Indonesia, bukan matlak’ Makkah. Selama ijtihad kita masih seperti itu, maka ada kemungkinan kadang-kadang kita berpuasa ‘Arafah tidak tepat pada hari wukuf. Padahal sekarang ini, untuk mengetahui kapan para hujjaj wukuf sangat mudah; dua atau tiga hari sebelum wukuf, Mufti kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan oleh media cetak dan elektronik ke seluruh dunia. Di Indonesia Al Irsyad, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan HTI yang sudah menggunakan matlak’ Makkah khususnya dalam hari raya Haji, bahkan juga hari Raya Idul Fitri.

Dengan uraian singkat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa idealnya kita berpuasa pada hari para hujjaj sedang melakukan wukuf, bukan pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu antara Arab Saudi dan Indonesia hanya ± 4 jam. Namun demikian, bagi orang yang mengikuti penetapan Pemerintah (Departemen Agama) tidak dapat disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dipandang sah secara hukum.”³⁵

³⁵ Lihat fatwa di rubrik Fatwa Agama Majalah Suara Muhammadiyah, lampiran

Menurut Amiruddin, dikeluarkannya fatwa tahun 2003 tersebut merupakan sebuah rekomendasi sekaligus peninjauan ulang terhadap kriteria penentuan awal bulan kamariah di Muhammadiyah, terutama untuk kasus Zuhijjah dan puasa ‘Arafah.³⁶ Menurutnya pada Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 di Padang Sumatera Barat tahun 2003, dimunculkan penegasan bahwa antara rukyat dan hisab sebagai metode penentuan awal bulan kamariah memiliki kedudukan yang sama dan Muhammadiyah memilih menggunakan hisab. Hisab yang digunakan adalah hisab hakiki dengan kriteria Wujūd al-hilāl, bukan imkan ar-rukyat, dan bukan pula ijtimak qabla al-gurūb. Sebenarnya, kriteria ini sudah lama digunakan Muhammadiyah, namun belum ditetapkan dalam putusan tarjih. Baru pada Munas Tarjih ke XXV tahun 2000 di Jakarta dikukuhkan penggunaan kriteria hisab hakiki *wujūd al-hilāl* sebagai kriteria penentuan awal bulan kamariah Muhammadiyah, yang kemudian kembali dipertegas di Munas Tarjih XXVI di Padang tahun 2003.³⁷

Namun fatwa tersebut dikoreksi kembali oleh forum Munas Tarjih yang resmi mengeluarkan hasil putusan di Munas Tarjih Nasional ke 26 di bidang Hisab dan Rukyat yang isinya antara lain:

- a. “*Hisab* mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zuhijjah
- b. *Hisab* sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan

³⁶ Hasil wawancara dengan Amiruddin sebagai Staf Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015 di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 November 2015

³⁷ *ibid*

Pusat Muhammadiyah ialah *Hisab Hakiki* dengan kriteria *Wujūd al-hilāl*

- c. *Matlak* yang digunakan adalah *matlak* yang didasarkan pada *Wilayāt al-hukmi* (Indonesia).
- d. Apabila Garis Batas *Wujud al-Hilāl* pada awal bulan kamariyah tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.³⁸.

Butir penting lain dalam Keputusan Munas Tarjih ke-26 ini adalahantisipasi terjadinya garis batas Wujūd al-hilāl yang melintas di atas wilayah Indonesia sehingga menjadikan sebagian wilayah Indonesia berada pada lintasan terpenuhinya kriteria Wujūd al-hilāl dan sebagian wilayah yang lain berada pada lintasan belum terpenuhinya kriteria Wujūd al-hilāl. Apabila hal ini terjadi, maka keputusan akhirnya diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.³⁹

D. Perbedaan Penetapan Puasa ‘Arafah Majelis Tarjih pada tahun 2003-2015

Dalam penentuan awal bulan Zulhijjah, Idul Adha maupun puasa ‘Arafah di Muhammadiyah sendiri terjadi beberapa perbedaan dengan Arab Saudi maupun dengan pemerintah Indonesia. Sebenarnya apabila diruntut tahun tahun sebelum tahun 2003 akan ditemukan juga beberapa perbedaan terkait penetapan Idul Adha maupun puasa ‘Arafah baik antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi maupun dengan Pemerintah Indonesia. Tetapi karena objek kajian dalam penelitian ini mengenai fatwa maka diawali

³⁸ Rupi’i Amri, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*, makalah Seminar Nasional “*Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H*”, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin 23 Juni 2014 M.h. 8

³⁹ hasil wawancara dengan Amiruddin di kantor Muhammadiyah Yogyakarta

dari tahun 2003, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas di tahun itu muncul fatwa bahwa penetapan hari puasa 'Arafah itu berdasarkan keputusan Arab Saudi atau mengikuti matlak nya Makkah Arab Saudi.

Mengenai perbedaan penetapan awal Zulhijjah dan hari 'Arafah yang pernah terjadi di Muhammadiyah dari tahun 2003-2015, menurut penuturan Susiknan Azhari ada beberapa perbedaan awal Zulhijjah dan hari 'Arafah terjadi pada tahun tahun berikut ini⁴⁰:

1. Pada tahun 2003, ketika itu Muhammadiyah bersamaan dengan Arab Saudi, sementara Pemerintah berbeda, ber Idul Adha belakangan. Saat inilah muncul usulan matlak Mekah agar tidak terjadi perbedaan dengan Arab Saudi. Tetapi, usulan itu tidak diterima pada Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003
2. Perbedaan pada tahun 2005 pada waktu itu Muhammadiyah dan Pemerintah Arab Saudi berlebaran Idul Adha secara bersama dan berbeda dengan hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI.
3. Di tahun 2006 Muhammadiyah dan Pemerintah RI merayakan Idul Adha secara bersama-sama dan berbeda dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi.
4. Pada tahun 2007, kembali terjadi perbedaan, tetapi kali ini Muhammadiyah dan Pemerintah di tanggal yang sama, sementara Arab Saudi sehari lebih dulu. Pada kasus ini Majelis Tarjih dan

⁴⁰<http://museumastronomi.com/wacana-kalender-islam-internasional/> diakses pada Senin 28 Desember 2015

Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan Penjelasan seputar perbedaan tersebut, yang menegaskan hasil hisab hakiki dengan kriteria Wujūd al-hilāl, bahwa puasa ‘Arafah dan Idul Adha tetap mengikuti kalender Muhammadiyah yang berlaku di Indonesia, tidak mengikuti penetapan hari wukuf di Arab Saudi.

5. Selanjutnya pada tahun 2010 Muhammadiyah dan Pemerintah Arab Saudi berlebaran Idul Adha secara bersama dan berbeda dengan hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI.
6. Pada tahun 2014, terjadi perbedaan. Lagi-lagi, Muhammadiyah dan Arab Saudi bersamaan, sementara Pemerintah lebih lambat satu hari. Muhammadiyah bisa bersamaan dengan Arab Saudi karena menurut hisab hakiki Wujūd al-hilāl sudah masuk tanggal bulan baru, sementara rukyat di Arab Saudi berhasil, sehingga sudah masuk tanggal baru juga.
7. Dan tahun 2015 juga kembali terjadi perbedaan. Kali ini, giliran Muhammadiyah yang harus berbeda dengan Arab Saudi dan Pemerintah. Muhammadiyah satu hari lebih dulu daripada Arab Saudi dan Pemerintah.

Perbedaan awal Zulhijjah maupun puasa ‘Arafah yang terjadi di Muhammadiyah yang sudah dijelaskan di atas, merupakan hasil penetapan Muhammadiyah melalui majelis Tarjih yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk maklumat untuk diinformasikan kepada warga Muhammadiyah di

seluruh Indonesia untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan puasa maupun berhari raya.

Di dalam hasil keputusan Muhammadiyah mengenai tahun tahun yang mengalami perbedaan tersebut dijelaskan bahwa untuk Zulhijjah tahun 2003 terjadi perbedaan penetapan awal bulan, idul adha dan puasa 'Arafah. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan awal Zulhijjah 1423 H jatuh pada Minggu, 2 Februari 2003, sehingga wukuf di 'Arafah jatuh pada 10 Februari 2003. Dengan demikian, Idul Adha 1423 H jatuh pada 11 Februari 2003.⁴¹ Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Prof Dr KH Said Agil Al-Munawar MA, berdasarkan rukyat menetapkan bulan Zulkaidah 1423 H harus disempurnakan 30 hari (diistimalkan), sehingga awal Zulhijjah 1423 H jatuh pada Senin, 3 Februari 2003 dan Hari Raya Idul Adha 1423 H jatuh pada Rabu, 12 Februari 2003. Sementara itu PP Muhammadiyah berdasarkan hisab *Wujūd al-hilāl* menetapkan waktu Idul Adha 1423 H sama dengan Pemerintah Arab Suadi, yakni 11 Februari 2003.⁴²

Kemudian tahun 2005 data hasil hisab Muhammadiyah sebagai berikut:

1. *Ijtimak* menjelang Zulhijjah 1425 H terjadi pada hari Senin Pahing, 10 Januari 2005 M pukul 19:04 WIB
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta -0°40' dan di seluruh wilayah Indonesia Bulan masih di bawah ufuk (belum wujud),

⁴¹ (*Suara Merdeka*, 4 Februari 2003)

⁴² Ahmad Izzuddin, dimuat di <http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/07/kha2.htm>.

Diakses pada Jum'at 11 Maret 2016.

3. Tanggal 1 Zulhijjah 1425 H jatuh pada hari Rabu Wage, 12 Januari 2005 M
4. Tanggal 10 Zulhijjah 1425 H jatuh pada hari Jum'at Pon 21 Januari 2005 M.⁴³

Tahun 2006 sebagaimana yang dikeluarkan Muhammadiyah lewat maklumatnya bahwa untuk Zulhijjah 1427 H hasil hisabnya sebaga berikut:

1. *Ijtimak* menjelang Zulhijjah 1427 H terjadi pada hari Rabu legi, 20 Desember 2006 pukul 21:01:26 WIB
2. Tinggi hilāl pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($= -07^{\circ} 48'$ dan $= 110^{\circ} 21' BT$) = $-01^{\circ} 17' 49''$ (*hilāl* belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari itu *hilāl* berada di bawah ufuk.
3. 1 Zulhijjah 1427 H jatuh pada hari Jumat Pon, 22 Desember 2006 M
4. Hari 'Arafah (9 Zulhijjah 1427 H) hari Sabtu Legi, 9 Januari 2006 M.
5. Idul Adha (10 Zulhijjah 1427 H) hari Ahad Pahing, 31 Desember 2006 M.⁴⁴

Selanjutnya di tahun 2007, pada tahun ini Muhammadiyah bersama dengan Pemerintah Indonesia tetapi berbeda dengan Arab Saudi. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan putusannya mengeluarkan maklumat mengenai Idul Adha dan puasa 'Arafah bahwa dari Maklumat No.

⁴³ Lihat selengkapnya di Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah lampiran

⁴⁴ Lihat selengkapnya di Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di lampiran

06/MLM/I.O/E/2007 tertanggal 23 Zulqa'dah 1428 H/3 Desember 2007 M, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Selasa Pahing 11 Desember 2007 M, tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu Kliwon 19 Desember 2007 M, dan tanggal 10 Zulhijjah (Idul Adha) 1428 H jatuh pada hari Kamis Legi 20 Desember 2007 M.⁴⁵

Sementara Arab Saudi melalui Majlis al-Qada' al-A'la (Majelis Peradilan Tertinggi), sebagaimana diberikan oleh kantor Berita Saudi Arabia WAS (*Wakalah al-Anba' as-Sa'udiyyah/ Saudi Press Agency, SPA*), mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1428 H jatuh pada hari Senin 10 Desember 2007 M, hari 'Arafah (9 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari Selasa 18 Desember 2007 M dan Idul Adha (10 Zulhijjah 1428 H) jatuh pada hari Rabu 19 Desember 2007 M.⁴⁶

Maka dari itu Puasa 'Arafah untuk kaum muslimin di Indonesia dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah 1428 H menurut penanggalan yang ditetapkan di Indonesia hari Rabu Kliwon bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2007 M dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhujjah 1428 H hari Kamis Legi bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2007 M.⁴⁷

Kemudian di tahun 2010, dari Maklumat resmi yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah Nomor: 05/MLM/I.O/E/2010, dengan data: Ijtimak menjelang Zulhijjah 1431 H terjadi pada hari Sabtu, 06 November 2010 M pukul 11:53:04 WIB. Tinggi hilāl pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ($\phi = -$

⁴⁵ lihat lengkapnya di maklumat resmi PP Muhammadiyah lampiran

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *Ibid.*

$07^{\circ}48'$ dan $\lambda = 110^{\circ}21'$ BT) = $+01^{\circ}34'23''$ (*hilāl sudah wujud*) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam hilāl sudah di atas ufuk. Kemudian berdasarkan hasil hisab tersebut maka pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa:

- a. 1 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Ahad, 07 November 2010 M
- b. Hari 'Arafah (9 Zulhijjah 1431 H) jatuh pada hari Senin, 15 November 2010 M.
- c. Idul Adha (10 Zulhijjah 1431 H) jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010 M.⁴⁸

Sementara itu Mahkamah Agung Arab Saudi melalui keputusan dengan nomor 18 H / tanggal 29/11 – 1/12 / 1431 H, menetapkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Ahad 7 November 2010 H, hari 'Arafah (9 Zulhijjah) 1431 H jatuh pada hari Senin 15 November 2010 M, dan IdulAdha 1431 H jatuh pada hari Selasa 1431 H. Dinyatakan pula bahwa penetapan itu berdasarkan rukyat yang dilakukan sejumlah saksi adil pada Sabtu sore 6 November 2010 M.⁴⁹

Pada tahun 2014 Muhammadiyah mengeluarkan pemberitahuan resmi melalui maklumat Nomor: 02/MLM/I.O/E/2014, yaitu sebagai berikut:

1. Ijtimak jelang Zulhijjah 1435 H terjadi pada hari Rabu legi, 24 September 2014 M pukul 13:15:45 WIB

⁴⁸ Lihat lengkapnya di Maklumat resmi Muhammadiyah, lampiran

⁴⁹ <http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-153-det-zulhijjah-tahun-baru-hijriah-dan-kalender-islam-global.html>, diakses pada Senin 14 Desember 2015

2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ}48'$ dan $\lambda = 100^{\circ}21' \text{ BT}$) = $+0^{\circ}30'04''$ (*hilāl sudah wujud*)
3. Pada saat matahari terbenam tanggal 24 September 2014 M (hari Rabu), di sebagian wilayah barat Indonesia hilāl sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas Wujūd al-hilāl melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan:

1. Tanggal 1 Ramadan 1435 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 28 Juni 2014 M.
2. Tanggal 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin Pon, 28 juli 2014 M.
3. Tanggal 1 Zulhijjah 1435 H jatuh pada hari Kamis Pahing, 25 September 2014 M.
4. Idul Adha (10 Zulhijjah 1435 H) jatuh pada hari Sabtu Legi, 4 Oktober 2014 M.⁵⁰

Untuk tahun 2015 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan maklumat nomor 01/MLM/I.0/E/2015 menegaskan bahwa hasil hisab Zulhijjah 1436 Hijriyyah sesuai dengan hisab hakiki Wujūd al-hilāl Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sebagai berikut:

⁵⁰ Lihat lengkapnya di Maklumat PP Muhammadiyah, lampiran

1. Ijtimak jelang Zulhijjah 1436 H terjadi pada hari Ahad Kliwon, 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB
2. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ($\phi = -07^{\circ}48'$ dan $\lambda = 100^{\circ}21'$ BT) = $+0^{\circ}25'52''$
3. Pada saat Matahari terbenam tanggal 13 September 2015 M (hari Ahad), di sebagian wilayah barat Indonesia hilāl sudah wujud dan di sebagian wilayah timur Indonesia belum wujud. Dengan demikian, garis batas Wujūd al-hilāl melewati wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian.

Berdasarkan hasil hisab tersebut maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan:

1. Tanggal 1 Zulhijjah 1436 H jatuh pada hari Senin Legi, 14 September 2015 M.
2. Hari 'Arafah (9 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 22 September 2015 M.
3. Idul Adha (10 Zulhijjah 1436 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 23 September 2015 M. Penetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagaimana terlampir.⁵¹

Demikian data hasil putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengenai Idul Adha dan Puasa 'Arafah dari tahun 2003-2015. Putusan ini merupakan hasil dari perhitungan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yang kemudian di keluarkan secara resmi melalui

⁵¹ Lihat selengkapnya di Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lampiran

Maklumat oleh PP Muhammadiyah untuk diimplementasikan oleh warga Muhammadiyah dalam menjalankan puasa, hari raya idul fitri, idul adha maupun puasa 'Arafah.

BAB IV

ANALISIS ANOMALI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PP MUHAMMADIYAH TENTANG PUASA ‘ARAFAH TAHUN 2003-2015

A. Analisis Anomali Fatwa Puasa ‘Arafah Majelis Tarjih

Penetapan waktu ibadah adalah salah satu dari fungsi kalender Hijriyah. Fungsi lain yaitu fungsi sipil, dari kalender Islam hampir seluruhnya telah diambil oleh kalender Masehi, sehingga yang tersisa adalah fungsi religius yaitu menata waktu ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah Islam adalah suatu ibadah yang dilaksanakan di suatu tempat tertentu di muka bumi (seperti Indonesia), tetapi waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Ibadah itu adalah puasa sunat ‘Arafah yang dikerjakan di mana pun di dunia termasuk di Indonesia, tetapi waktunya adalah pada hari terjadinya wukuf di ‘Arafah, Mekah.¹

Ada silang pendapat apakah puasa ‘Arafah harus dilaksanakan ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf di ‘Arafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah waktu masing-masing.² Muhammadiyah sendiri memahami bahwa hari ‘Arafah adalah hari pada setiap bulan Zulhijjah di mana jamaah haji yang sedang melaksanakan rangkaian manasik haji melakukan wukuf di padang

¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah*, td, 2015, hlm. 2

² Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 08 Desember 2015 di ruang Dosen Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

‘Arafah, Mekkah, Arab Saudi, dan itu adalah tanggal 09 Zulhijjah. Hari sebelumnya, yaitu tanggal 08 Zulhijjah dinamakan hari *Tarwiyah* di mana jamaah haji berangkat dari Mekkah ke Mina.³ Maka dari itu pelaksanaan puasa ‘Arafah berkaitan dengan kejadian saat jamaah haji wukuf di padang ‘Arafah. Menurut Muhammadiyah pendapat yang menyatakan bahwa puasa ‘Arafah tidak dikaitkan dengan peristiwa wukuf di ‘Arafah rasanya sangat janggal. Alasan bahwa penamaan puasanya adalah puasa ‘Arafah (pakai h di akhirnya), sedangkan nama tempat wukuf adalah Arafat (pakai t di akhirnya/bentuk jamak), sehingga wukuf di Arafat (pakai t) tidak menjadi sebab adanya puasa ‘Arafah (pakai h), adalah argumen yang terlalu mengada-ada. Bahwa tempat wukuf dinamakan Arafat (pakai t), itu hanyalah salah satu nama saja. Tempat wukuf itu juga dinamakan ‘Arafah (pakai h) sebagaimana disebutkan dalam hadis Abd ar-Rahman Ibn Y‘amar ad-Dili riwayat Ahmad, an-Nasai, Ibn Majah, ad-Daraquti, dan Ibn Abi Syaibah begitu pula dalam

³Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah*, td, 2015, hlm. 3

hadis Umm al-Fadl⁴. Jadi puasa ‘Arafah terkait dengan peristiwa wukuf di ‘Arafah.⁵

Menurut penafsiran Muhammadiyah dalam mengartikan kata تسع ذي الحجة (tis ‘u zilhijjah) dalam hadis Hunaidah riwayat Abu Dawud, Ahmad dan al-Baihaqi⁶, sebagai tanggal 9 Zulhijjah jelas suatu kesalahan secara tata bahasa Arab. Tidak ada ulama yang menafsirkan demikian. Kata تسع ذي الحجة (tis ‘u zilhijjah) dalam hadis diartikan sebagai 9 hari pada bulan Zulhijjah sama halnya dengan kata العشر الاخر من رمضان yang artinya 10 akhir bulan Ramadhan bukan tanggal 10 bulan Ramadhan.⁷ Sedangkan tanggal 9 Zulhijjah itu dalam bahasa Arab adalah تاسع ذالحجة (tas ‘i zilhijjah). Begitu pula kata العشر dalam hadis Aisyah artinya 10 hari bulan Zulhijjah, bukan tanggal 10 Zulhijjah.

⁴ Redaksi hadisnya yaitu:

عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت اليه بقدر لبن وهو واقف علي بعيره بعرفة [رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم وابو داود ومالك واحمد]

dari Ummul Fadl Binti al-Hariz (diriwayatkan) bahwa orang-orang berdebat di dekat beliau pada hari ‘Arafah tentang apakah Rasulullah saw berpuasa pada hari itu. Sebagian mengatakan: Beliau berpuasa, dan sebagian lain mengatakan tidak berpuasa. Maka aku (Ummul Fadl) mengirim satu cawun susu (kepada beliau) yang berada di atas untanya di ‘Arafah, lalu beliau minum (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad). *ibid*, hlm 6

⁵*ibid*, hlm. 4

⁶ Bunyi hadis tersebut

عن هنيذة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذالحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس [رواه ابو داود واحمد والبيهقي. صححه الالباني وضعفه الارنؤوط]

“Dari Hunaidah Ibn Khalid, dari isterinya, dari salah seorang istri nabi saw (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah saw melakukan puasa pada sembilan hari bulan Zulhijjah, hari Asyura, tiga hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan (HR Abu Dawud, Ahmad, dan al-Baihaqi: disahihkan oleh al-Albani dan didaifkan oleh al-Arna’ut), *ibid*, hlm 7

⁷Wawancara dengan Syamsul Anwar sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah periode 2010-2015 di Ruang Dosen Prodi Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Selasa 8 Desember 2015 pukul 11.25 WIB.

Maksud hadis ini adalah bahwa puasa sunat pada bulan Zulhijjah itu dilakukan juga pada 10 hari pertama Zulhijjah.

Namun para ulama membuat takwil bahwa yang dimaksud adalah 9 hari pertama Zulhijjah karena pada hari ke 10, hari Idul Adha, dilarang berpuasa. Penyebutan 10 hari pertama Zulhijjah ini karena dalam hadis-hadis lain diterangkan keutamaan beribadah pada sepuluh hari tersebut, termasuk keutamaan berpuasa, hanya saja karena hari Idul Adha dilarang puasa, maka secara otomatis menurut pemahaman akal maksudnya adalah sembilan hari. Dengan kata lain dalam hadis ini ada *istisna aqli* (pengecualian berdasarkan logika pikiran). Demikian Ali al-Qari (w. 1014/1605) dalam *Mirqatul Mafatih*. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa puasa ‘Arafah tidak dikaitkan dengan kegiatan wukuf di ‘Arafah berdasarkan hadis-hadis tersebut tidak tepat.⁸

Dalam persoalan ini, menurut penulis hal ini bisa dipahami bahwa keseragaman dalam melaksanakan ibadah puasa ‘Arafah maupun puasa Ramadan, Syawwal dan Zulhijjah merupakan suatu cita-cita bersama. Tak terkecuali Muhammadiyah, hal ini tercermin dari pendapat bahwa puasa ‘Arafah merupakan ibadah puasa yang dilaksanakan sesuai dengan prosesi wukuf di Arafah karena hal itu akan terlaksana jika umat Islam di dunia mempunyai satu kalender Hijriyah tunggal yang bersifat global.

⁸Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Unifikasi...*, hlm 11

Mengenai fatwa Majelis Tarjih tentang puasa Arafah, secara lengkap diktum fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Puasa Arafah sebagai berikut :

Pertama, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa: (1) perihal pelaksanaan ibadah Puasa Arafah, idealnya mengikuti sebagaimana keputusan Makkah, atau menggunakan mathla' Makkah karena Makkah merupakan tempat wukuf di Arafah). (2) hadis yang dipakai pijakan adalah (رواه الجماعة) (3) *صوم عرفة يكفر سنتين ماضية أو مستقبلية* bagi orang yang mengikuti penetapan Pemerintah (Departemen Agama) tidak dapat disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dipandang sah secara hukum.". *Kedua*, rekomendasi. berpuasa pada hari para hujjaj sedang melakukan wukuf, bukan pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu antara Arab Saudi dan Indonesia hanya ± 4 jam.

Apabila diteliti isi diktum fatwa tersebut menyimpang dari apa yang sudah dijadikan pegangan oleh Muhammadiyah mengenai penetapan awal bulan. Muhammadiyah menggunakan hisab sebagai pedoman penyusunan kalender Hijriyyah dan bukan semata untuk penentuan bulan-bulan suci dengan mengacu Kitab Keputusan Wiradesa 1973, meski upaya membakukan hisab telah dirintis sejak masa K.H. Ahmad Dahlan. Hisāb yang digunakan adalah hisab hakiki dengan “kriteria” wujud al-hilāl tanpa wilāyat al-ḥukmi. Dalam “kriteria” ini, bulan diasumsikan berada dalam fase hilāl ketika puncak cakram bulan tepat bersentuhan dengan horizon barat kala matahari terbenam,

yang secara matematis diterjemahkan sebagai $Lag \geq -2$ menit secara geosentrik. Apabila garis $Lag = -2$ menit melintasi Indonesia, maka daerah yang terletak di sisi timur garis tersebut akan memasuki tanggal 1 Hijriyyah sehari lebih lambat ketimbang daerah yang ada di sisi baratnya. Muhammadiyah tergolong konsisten menggunakan hisab meski tetap terdapat deviasi lokal.⁹ Kemudian, permasalahan matlak sendiri dikaji ulang dan diputuskan dengan wilayāt al-hukmi yang secara resmi diputuskan di Munas Tarjih ke 26 di padang.

Secara kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah keberadaan fatwa mengenai 'Arafah tahun 2003 sudah ada ketentuan baku yang lebih tinggi dan mengikat yaitu hasil putusan tarjih yang dihasilkan dengan metode Musyawarah Nasional Tarjih ke 26 yang dilaksanakan di Padang. Sehingga Muhammadiyah menggunakan matlak wilayāt al-hukmi dalam penetapan awal bulan kamariahnya. Dengan begitu keputusan yang dipakai di Muhammadiyah adalah hasil Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih) yang secara sendirinya menghapus keberadaan fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan secara hierarki kedudukan fatwa di majelis tarjih sebagai sebuah produk berada di bawah putusan tarjih melalui Musyawarah Nasional Tarjih.

Namun, menurut penulis hal ini dilematis, di satu sisi fatwa sebagai hasil dari produk Majelis Tarjih dan sudah barang tentu menggunakan dalil-

⁹ Muh. Ma'rufin Sudibyo, dimuat dalam jurnal Al-ahkam vol. 24 no. 1, April 2014. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah bekerjasama dengan LPKBHI IAIN Walisongo Semarang, hal. 116

dalil yang bersumber dari Al Quran dan hadis dalam penetapannya. Namun disisi lain setelah ditanfızkan di munas fatwa teesebut tidak disetujui oleh forum. Lantas bagaimana hukumnya apabila ada warga Muhammadiyah yang mengamalkan hasil dari fatwa tersebut?

Sehingga dari kaca mata hukum, bisa dikatakan apa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih (Divisi fatwa) dalam fatwa majelis tarjih yang dikeluarkan pada tahun 1423 H/2003 M telah batal demi hukum. Dalam fatwa majelis tarjih mengusulkan agar menggunakan matlak Arab Saudi dalam penetapan hari ‘Arafah. sementara terkait persoalan tersebut Majelis tarjih mengeluarkan putusan yang sifatnya mengikat dan lebih tinggi kedudukannya dari fatwa yaitu tetap pada kriteria dulu dengan menggunakan matlak fiwilayāt al-hukmi yang dilaksanakan lewat metode Musyawarah Nasional Tarjih di Padang 1-5 Oktober 2003. Sehingga fungsi dan peran lembaga fatwa yang bertugas memberikan jawaban terhadap pertanyaan terkait masalah keagamaan menjadi tumpul, tidak memiliki kekuatan hukum. Namun apabila ada yang masih ragu dan memilih berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan berpedoman terhadap hasil fatwa tersebut maka sikap itu hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak untuk disiarkan apalagi mengajak orang lain, terlebih menggunakan nama organisasi Muhammadiyah di tingkat ia berada.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Amiruddin staff sekretaris PP Muhammadiyah pusat di kantor PP Muhammadiyah Pusat Yogyakarta Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 November 2015

Perbedaan perbedaan penetapan awal bulan Zulhijjah (Idul Adha maupun ‘Arafah) dari tahun 2003-2015 yang penulis lampirkan di bab sebelumnya merupakan hasil keputusan hisab Majelis Tarjih Muhammadiyah. Adapun adanya perbedaan baik antara Muhammadiyah dengan pemerintah Indonesia maupun dengan Arab Saudi merupakan perbedaan yang didasari setidaknya tiga pokok permasalahan, Pertama kedudukan hisab dan rukyat, kedua pengertian “yaum ‘Arafah”, dan ketiga matlak. Apabila diruntut perbedaan perbedaan tersebut sejak tahun 2003, 2005, 2010, dan 2014 Muhammadiyah dan Pemerintah Arab Saudi berlebaran Idul Adha secara bersama dan berbeda dengan hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama RI. Dan 2006, dan 2007 Muhammadiyah dan Pemerintah RI merayakan Idul Adha secara bersama-sama dan berbeda dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi. Sehingga tidak benar apabila dikatakan Muhammadiyah tidak konsisten dengan kriterianya terutama dalam kasus ‘Arafah apalagi dengan menyertakan fatwa matlak Arab Saudi sebagai acuan dalam penetapan awal bulan kamariah. Karena hal ini sudah jelas bahwa sejatinya hukum dari fatwa tersebut sudah tidak berlaku di Muhammadiyah meskipun ada orang yang mengamalkannya namun itu semata-mata karena alasan personal bukan atas nama keorganisasian Muhammadiyah.

Namun, disamping itu perbedaan penetapan Muhammadiyah dengan Arab Saudi bisa dikarenakan faktor inkonsistensi dari ketetapan Arab Saudi, meskipun dalam penetapannya memakai hisab, namun untuk bulan bulan

Ramadan, Syawal maupun Zulhijjah menunggu laporan rukyatulhilāl. Sebagai contoh Idul Adha 1427 H, seperti yang dijelaskan sebelumnya di bab III bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan hari Idul Adha 1427 H jatuh bertepatan dengan hari Minggu 31 Desember 2006, Muhammadiyah yang menggunakan hisab menetapkan jauh jauh hari bahwa Idul Adha jatuh hari Minggu 31 Desember 2006. Namun yang membingungkan pemerintah Arab Saudi ternyata menetapkan wukuf terjadi pada hari jum'at 29 Desember 2006, ini berarti di Arab Saudi dan sekitarnya Idul Adha jatuh sehari setelah wukuf yaitu hari Sabtu 30 Desember 2006.

Oleh karena itu untuk menghitung ketinggian hilāl setelah konjungi pada 29 Dzulqaidah 1427 H, berdasarkan program komputer *Accurate Times 5.1* dengan basis hitungan digunakan kota Mekah dengan informasi geografis sebagai berikut:¹¹

Lokasi : Mekah, Saudi Arabia

Lintang : 21° 25' 22" (lintang Utara)

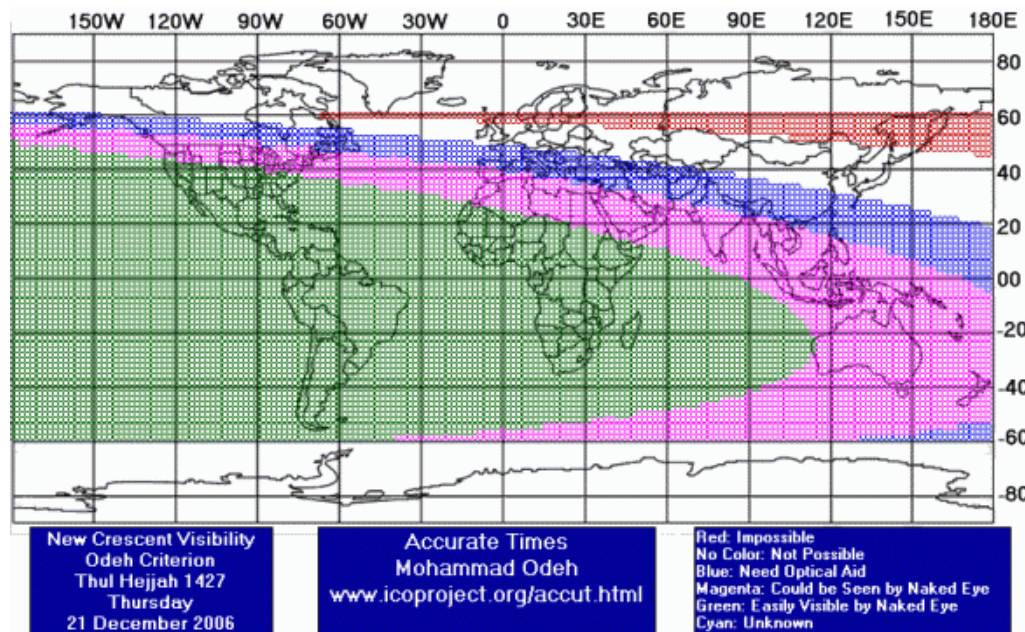
Bujur : 39° 49' 31" (bujur Timur)

Sudut depresi Matahari : 18 °

Ketinggian (dari muka laut) : 304 meter (di atas muka laut)

Dari program komputer perhitungan hisab *Jordanian Astronomical Society* (JAS), yang dikembangkan oleh Mohammad Odeh (*Accurate Times*

¹¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Hisab & Rukyat*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, hlm. 175



5.1), memberikan hasil hitungan Wujūd al-hilāl 29 Dzulqa'dah 1427 H yang terjadi di Mekkah adalah bertepatan dengan maghrib pada 21 Desember 2006. Ketinggian hilāl pada saat itu adalah sekitar 11,75 ° busur. Ketinggian sebesar ini sebetulnya termasuk cukup tinggi dan jika kondisi langit cukup bersih, kemungkinan untuk tidak dapat melihat hilāl sangat kecil sekali meskipun oleh perukyat mata telanjang (tanpa bantuan alat optik). Dengan ketinggian hilāl seperti ini, berarti 47 menit dan 1 detik setelah maghrib (Matahari terbenam), Bulan pun tenggelam.¹² Gambaran untuk peta visibilitas hilāl bisa dilihat pada gambar di bawah ini yang diambil berdasarkan program Muhammad Odeh.

peta dunia visibilitas hilāl untuk 21 Desember 2006 (sumber program: Mohammad Odeh, JAS)

¹² Ibid. Hlm 176

Dengan demikian kadang penetapan yang dilakukan oleh Arab Saudi melalui Majelis Al-Qadla Al-A'la (Mahkamah Tinggi) kontroversial seperti kasus Zulhijjah 2006. Saat itu maghrib 20 Desember 2006 bulan telah berada di bawah ufuk. Namun ternyata ada laporan rukyat dan diterima oleh Majelis Al-Qadha Al-A'la sehingga awal Zulhijjah di Arab Saudi jatuh pada 21 Desember 2006 dan Idul Adha jatuh pada 30 Desember 2006. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan penetapan Muhammadiyah dengan Arab Saudi meskipun sama-sama menggunakan hisab namun untuk bulan-bulan Ramadhan, Syawwal, dan Zulhijjah Arab Saudi menggunakan rukyat dalam penetapannya.

Tegasnya secara resmi Muhammadiyah menetapkan status fatwa puasa 'Arafah tahun 2003 melalui keputusan Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 Komisi Hisab dan Rukyat tentang "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan *Matlak*" sebagai berikut:

1. "*Hisab* mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah
2. *Hisab* sebagaimana tersebut pada poin satu yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah *Hisab Hakiki* dengan kriteria *Wujūd al-hilāl*
3. *Matlak* yang digunakan adalah *matlak* yang didasarkan pada *Wilayah al-Hukmi* (Indonesia).
4. Apabila Garis Batas *Wujul al-Hilāl* pada awal bulan kamariyah tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan

menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.¹³

Menurut penulis adanya anomali dari fatwa puasa ‘Arafah tahun 2003-2015 bahwa sejak dikeluarkannya fatwa mengenai puasa ‘Arafah oleh Majelis Tarjih dengan ketentuan menggunakan matlak Arab Saudi (Makkah) dalam melaksanakan puasa ‘Arafah, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan metode yang sudah digunakan Muhammadiyah sejak lama. Kemudian setelah disidangkan di Munas Tarjih ke 28 di Padang telah ditetapkan perintah yang lebih mengikat dengan ketentuan menggunakan matlak wilayāt al-hukmi sehingga dalam melaksanakan puasa ‘Arafah maupun penetapan awal bulan kamariah Muhammadiyah tetap menggunakan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih berdasarkan hasil hisabnya yang kemudian disebarkan dalam bentuk Maklumat awal bulan. Sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah konsisten dengan hasil keputusan Musyawarah Nasional tersebut, namun apabila ada perseorangan yang menggunakan fatwa tersebut hal itu atas dasar pribadi saja dan tidak boleh membawa atas nama organisasi.

B. Analisis Faktor-faktor yang melatar belakangi Fatwa Puasa ‘Arafah tahun 2003

Secara garis besar bahwa dikeluarkannya fatwa tersebut karena adanya perbedaan dalam melaksanakan awal Zulhijjah terutama ketika puasa ‘Arafah tidak sesuai dengan jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang ‘Arafah.

¹³ Rupi’i Amri, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*, makalah Seminar Nasional “*Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H*”, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin 23 Juni 2014 M.h. 8

Inilah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya usulan dikeluarkan fatwa tersebut¹⁴. Menanggapi adanya perubahan tersebut Oman Fathurrohman berpendapat bahwa hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan pemahaman mengenai pelaksanaan puasa ‘Arafah hendaknya sebagaimana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang ‘Arafah namun sampai sekarang Muhammadiyah menetapkan berdasarkan kriteria penanggalan sendiri, karena Muhammadiyah sendiri mempunyai kaidah kaidah dalam penentuan awal bulan. Ketika di Muhammadiyah sendiri melakukan hisab dan memperhitungkan bahwa hilāl masih di bawah ufuk, namun Arab Saudi menetapkan berbeda karena ada yang melihat hilāl dan laporan tersebut diterima, padahal menurut perhitungan kontemporer sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah hilāl masih di bawah ufuk. Maka menurut Muhammadiyah adanya kekeliruan dalam penetapan Arab Saudi, sehingga belum tentu benar mengikuti apa yang diputuskan Arab Saudi. Maka dari itu tidak perlu mengikuti keputusan Arab Saudi akan tetapi Muhammadiyah tetap dengan hasil perhitungan yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah sendiri.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Amiruddin, staf sekretaris Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah Yogyakarta di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19 November 2015

¹⁵ Wawancara dengan Oman Fathurrohman pada tanggal 04 Mei 2016 di Aula lantai 1 UIN Walisongo Semarang.

Disamping itu penulis melihat terdapat faktor lain yang melatar belakangi ditetapkan fatwa ini dari Majelis Tarjih. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih

Munculnya fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tahun 2003 menurut penulis dilatar belakangi oleh faktor ketokohnya terutama dari divisi fatwa saat itu. Fatwa tentang puasa ‘Arafah yang dikeluarkan oleh majelis Tarjih dilatar belakangi oleh adanya ketokohan dari Ismail Thaib sebagai ketua divisi fatwa. Penulis melihat dalam proses adanya fatwa puasa ‘Arafah tahun 2003 itu secara personal intern Muhammadiyah memang ada yang menghendaki menggunakan matlak Arab Saudi terutama dalam persoalan puasa ‘Arafah. Diantara yang mengusulkan dan memfatwakan hal ini yaitu Ismail Thaib sebagai ketua divisi fatwa Majelis Tarjih pada waktu itu, hal ini bisa dilihat dari pemikiran dan tulisan Ismail seperti dalam majalah suara Muhammadiyah No. 06 Th. Ke-88, 16-31 Maret 2003 M (lihat lampiran) dengan judul tulisan “ *Pergunakan “Matlak” (Rising Place) Makkah dalam penetapan satu Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah (hari raya Fitri dan Adha)*.”¹⁶ Bahkan Ismail tidak hanya mengkhususkan penggunaan matlak Makkah bagi bulan Zulhijjah saja akan tetapi bagi bulan bulan yang lainnya juga seperti Ramadan maupun Syawal. Dengan argumentasi bahwa:

¹⁶ Tulisan lengkap Ismail Thaib “ *Pergunakan “Matlak” (Rising Place) Makkah dalam penetapan satu Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah (hari raya Fitri dan Adha)*” dilihat di lampiran

Berbeda halnya dalam menghadapi perbedaan matlak menentukan awal bulan, Idul Fitri, Idul Adha, wuquf dan hari-hari tasyrik, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, artinya ada yang tetap kukuh bahkan ngotot mempertahankan matlak daerahnya, negerinya atau tempatnya dan ada pula yang tidak mengikatkan dirinya dengan matlak tempatnya/negerinya. bahkan mengambil matlak negara lainnya. Pendapat kedua ini argumentasinya jauh lebih kuat dari pendapat pertama (ingat ini masalah ijtihadiyai.). Khilaf di sini bukanlah suatu khilaf (perbedaan pendapat) dalam bidang aqidah atau dalam bidang dasar-dasar hukum Islam, tetapi lebih disebabkan karena hilangnya rasa kesatuan dan persatuan di antara umat Islam sendiri karena intern atau ekstern yang seharusnya tidak perlu terjadi.¹⁷

Mengenai perbedaan matlak antara Indonesia dengan Arab Saudi dengan argumen sebagaimana hadis Kuraib, hal ini tidak sebagaimana yang dikatakan olehnya. Dalam pandangannya bahwa terdapat unsur politis dalam pengambilan keputusan di dalam hadis tersebut. Lebih jauh ia mengatakan bahwa:

Kalau orang beralasan bukanlah sahabat Ibnu Abbas tidak memakai matlak negeri Siria (Damaskus), tetapi beliau tetap bertahan dengan matlak Madinah dimana waktu itu beliau sendiri sebagai gubernur Madinah, tidak tunduk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah waktu itu? Pertanyaan seperti itu bagi orang yang mau dengan cermat mempelajari sejarah islam, dengan mudah akan dapat menjawab, yaitu dikarenakan perbedaan yang bersifat politis, akibat kurang harmonis hubungan Ibnu Abbas dengan Muawwiyah. Sebenarnya sahabat Ibnu Abbas tidak setuju dengan mekanisme pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah, dan dimasa pemerintahan Ali bin Abi Thalib Muawiyah tidak mau tunduk kepada khalifah rasyidin ke 4 ini dengan dalih dia mempunyai hak karena kematian Usman bin Affan secara dalim. Pandangan politik Ibnu Abbas sama dengan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah sendiri mengangkat sahabat Ibnu Abbas sebagai gubernur Madinah boleh dikatakan penuh

¹⁷ *Ibid.*

perhitungan politik, supaya tidak timbul gejolak mengingat Ibnu Abbas disamping ilmunya sangat luas (syaikhul mufassirin atau turjamanul quran) serta kedekatan nasab dengan Rasulullah saw.¹⁸

Dari tulisan ini memperlihatkan bahwa adanya corak pemikiran yang berbeda dari ketua divisi fatwa pada saat itu sehingga dalam memutuskan sebuah fatwa mengenai puasa ‘Arafah mengusulkan untuk menggunakan matlak Arab Saudi. Hal ini menurut Susiknan Azhari dalam catatan bukunya mengatakan bahwa pemikiran apa yang dituliskan oleh Ismail merupakan hasil pengembangan dari pada pemikiran Hasbi as-shiddieqy.¹⁹ Sehingga menurut penulis di sini terdapat tujuan dalam menyatukan bulan-bulan ibadah dan hari ‘Arafah sehingga tidak ada perbedaan lagi yang terjadi di umat Islam di dunia. Kemudian diimplementasikan dalam bentuk fatwa sebagai produk ijtihad Majelis Tarjih dalam menjawab permasalahan keislaman di masyarakat.

2. Faktor sosial

Maksud dari faktor ini adalah karena seringnya mengalami perbedaan dalam berhari raya maupun di hari ‘Arafah dikalangan masyarakat islam sehingga khawatir apabila hukum ketika melakukan puasa dari sunnah menjadi haram karena berpuasa pada hari raya. Pada tahun 2003 sendiri memang terjadi perbedaan bulan Zulhijjah antara Muhammadiyah dengan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Lihat di catatan kaki Susiknan Azhari “*Kalender Islam ke arah Integrasi Muhammadiyah NU*”, *Kalender Islam (Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, hal. 90

pemerintah Indonesia, namun Muhammadiyah pada waktu itu bersamaan dengan ketetapan pemerintah Arab Saudi.

Apabila dilihat dari latar belakang dikeluarkannya fatwa tersebut memang tidak terlepas dari perbedaan idul Adha 1423 H yang terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah Indonesia namun bersamaan dengan keputusan Arab Saudi. Kriteria yang saat ini digunakan Arab Saudi menyatakan, “Jika pada tanggal 29 dalam penanggalan Hijriah telah memenuhi 2 (dua) kondisi, yaitu (1) Konjungsi telah terjadi sebelum Matahari tenggelam, dan (2) Bulan tenggelam setelah Matahari, maka kesokan harinya telah masuk bulan baru (tanggal 1).”²⁰ Sehingga berdasarkan kriteria tersebut, Arab Saudi akan merayakan Idul Adha pada tanggal 11 Februari 2003. Hal ini disebabkan pada tanggal 1 Februari 2003 kedua kondisi tersebut telah terpenuhi untuk wilayah Arab Saudi.²¹

Perbedaan Zulhijjah 1423 H dilingkungan Muhammadiyah sendiri sempat mengalami permasalahan sendiri terkait dengan adanya Hilāl telah wujud bisa juga terjadi sebelum ijtima. Di Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan bulan telah wujud pada saat maghrib 1 Februari, tetapi belum terjadi ijtima.²² Namun dalam masalah ini masalah ini teratasi dengan matlak wilayāt al-hukmi.

²⁰ Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008, cet. 1, hlm. 61

²¹ *Ibid*

²² Thomas Djamalluddin, pdf, *Pengertian dan perbandingan Madzhab tentang Hisab Rukyat dan Matlak* (Kritik terhadap Teori Wujūd al-hilāl dan Matlak Wilayāt al-hukmi), dalam "Musyawarah Nasional Tarjih ke-26", PP Muhammadiyah, Padang 1 – 5 Oktober 2003

Menurut perhitungan garis Wujūd al-hilāl di seluruh Indonesia seperti yang digambarkan sebagai berikut:



Ijima' awal Dzulhijjah 1423 pada 1 Februari 2003 pukul 17:51 WIB. Pada saat maghrib 1 Februari bulan belum berumur 8 jam dan tinggi bulan kurang dari 2 derajat. Menurut kriteria imkan rukyat dan MABIMS 1 Dzulhijjah 1423 jatuh pada 3 Februari 2003 dan Idul Adha pada 12 Februari 2003. Tetapi menurut kriteria wujudul hilal dan ijima' qabla ghurub 1 Dzulhijjah jatuh pada 2 Februari 2003 dan Idul Adha pada 11 Februari 2003. Pemerintah akan menetapkan Idul Adha setelah melakukan sidang isbat pada 1 Februari 2003.

ilustrasi garis tanggal Zulhijjah²³

Secara astronomis konsep Garis batas *Wujūd al-hilāl* akan membelah menjadi dua wilayah yaitu wilayah yang berada disebelah barat garis batas *Wujūd al-hilāl* dan wilayah yang berada disebelah timur garis batas *Wujūd al-hilāl*. Wilayah yang berada disebelah barat garis batas *Wujūd al-hilāl*, Matahari akan terbenam terlebih dahulu dari pada Bulan dan pada saat terbenam Matahari itu Bulan berada di atas ufuk sehingga Bulan telah wujud dan pada saat itu juga sudah masuk bulan baru sedangkan wilayah yang berada di sebelah timur garis batas *Wujūd al-hilāl* Bulan lebih dahulu terbenam dari pada Matahari sehingga Bulan berada di bawah ufuk dengan kata lain bulan belum wujud pada saat Matahari terbenam, sehingga bulan

²³<https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2010/06/garis-tanggal-Zulhijjah-1423.jpg>. Diakses pada 19 April 2016

baru belum masuk melainkan masih termasuk bulan yang sedang berlangsung.²⁴

Ada saat ketika terjadi kasus pada belahan Indonesia bagian timur didapatkan ketinggian *hilāl* yang minus di bawah ufuk sedangkan untuk bagian barat telah berada di nilai nol derajat keatas, untuk permasalahan ini Majelis Tajih dan Tajdid memberikan kerangka kerja operasional *matlak* dalam pemaduan mayoritas fungsional dan minoritas fungsional.²⁵ Kemudian Dalam hal ini kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis dapat diketahui bahwa konsep *matlak wilayāt al-hukmi* yang diterapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dapat diterima sebagai bentuk penghindaran *mafsadat* dengan jalan untuk menyeragamkan pandangan mengenai penentuan awal bulan kamariah. Dapat dimaklumi dan diterima bahwa yang memiliki hak otoritas adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan bukan masing-masing Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Apabila diserahkan pada masing-masing Pimpinan

²⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat (Menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta; Erlangga, 2007, hlm. 15

²⁵ Mayoritas fungsional adalah wacana penerapan hasil keputusan yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, sedangkan untuk Minoritas fungsional adalah keberlakuan hasil keputusan tentang awal bulan kamariah yang berlaku pada daerah tertentu saja dalam masalah kasuistik perbedaan hasil yang didapatkan sesuai pertimbangan kemaslahatan maupun kepentingan suatu daerah. Lihat Anik Zakariah skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015, hal. 63

²⁶ Ismail Khudhori, *Metode Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dalam Perspektif Uṣūl Fikih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah's calender unification, an effort for seeking crescent's criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012 di Hotel Siliwangi Semarang hlm. 13

Cabang, maka akan terjadi *khilafiyah* dalam menentukan awal bulan yang diakibatkan perbedaan wilayah antar cabang dalam posisi garis *wujūd al-hilāl*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Adanya fatwa mengenai puasa ‘Arafah tahun 2003 merupakan jawaban dari pertanyaan masyarakat kepada Majelis Tarjih yang kemudian disidangkan oleh divisi fatwa saat itu. Isi diktum dari fatwa bertentangan dengan apa yang digunakan Muhammadiyah dalam hal matlak, sehingga terjadi anomali dari fatwa tersebut. Namun, secara kelembagaan di lingkungan Muhammadiyah keberadaan fatwa mengenai ‘Arafah tahun 2003 ada ketentuan baku yang lebih tinggi dan mengikat yaitu hasil putusan Tarjih yang dihasilkan dengan metode Musyawarah Nasional Tarjih ke 26 yang dilaksanakan di Padang. Karena secara hierarki ada kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat yaitu putusan Tarjih yang diputuskan melalui cara Musyawarah Nasional Tarjih. Oleh sebab itu, Muhammadiyah konsisten dengan metode yang sudah ditetapkan dalam Munas Tarjih ke 26, dan fatwa tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bagi warga maupun Pimpinan Muhammadiyah untuk berhariraya maupun puasa ‘Arafah mengikuti ketetapan Pemerintah Arab Saudi.
2. Faktor yang mempengaruhi perubahan fatwa ‘Arafah dengan menggunakan matlak Makkah, antara lain adalah karena faktor

ketokohan dari pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid terutama di bidang fatwa. Di samping itu juga rekomendasi sekaligus peninjauan ulang terhadap kriteria penentuan awal bulan kamariah di Muhammadiyah, terutama untuk kasus Zulhijjah dan puasa 'Arafah yang kemudian ditetapkan di Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2003 di Padang dengan ketetapan menggunakan matlak wilayah al-hukmi.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis tentang Dinamika fatwa Majelis Tarjih tentang puasa 'Arafah tahun 2003-2015, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Jika mengakui fatwa sebagai produk Tarjih maka sebaiknya pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan divisi dibawahnya dalam menetapkan atau mengeluarkan sebuah fatwa. Agar masyarakat tidak dibuat bingung apabila terjadi adanya ketidak sesuaian antara hasil fatwa tersebut dengan putusan yang berada diatasnya. Dengan begitu warga Muhammadiyah bisa mengimplementasikan hasil keputusan Majelis Tarjih dalam penetapan awal bulan yang biasa dipublikasikan melalui maklumat.
2. Perlu adanya sosialisasi yang masif dari Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai macam-macam produk Majelis Tarjih tentang suatu hukum atau permasalahan. Sehingga seluruh warga Muhammadiyah tidak mengalami kebingungan ketika adanya dua hasil produk ijtihad Majelis Tarjih yang saling kontradiktif.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karuniah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan diberbagai segi. Namun, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan, dan kritik yang sifatnya konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.
Wallah al-A'lam bi ash-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab:

- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, cet. IV, 2007
- Abi Abdil M'uti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, *Nihayatu Zein*, Darul Kutub Arabiyah Indonesia
- Abi, Imam Abdi rohman Ahmad Syu'aib An-Nasa'i, *Assunanul Kubra*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, juz 2, 1991
- Abi, Imam Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairin Naisaburi, *Şahih Muslim*, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 4, 1413 H/1992
- Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Damaskus: Daaral-Fikr, tt
- Ahmad Al-Jurjawi, Syeikh Ali, *Hikmatu Tasyr 'i Wafalsafatuhu terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*", Semarang: Asy-Syifa, tt, td
- Al-Anshari, Zakaria, Fathal-Wahhab, Beirut: Dar al-Fkr, t. th., Juz 1
- Ali bin Hajar al-Asqalani, bin Ahmad, *Fathul Bari*, Beirut: Darul Fikr, tt, juz 4
- Al-Malibari, Zainuddin, Fathal-Mu'in pada Tarsyihal-Mustafidin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th
- Al-Zuhaily, Wahbah alih bahasa Agus Effendi dan BahrudinFannany, *Puasa dan Itikaf (kajian berbagai madzhab)*, Bandung: Remaja RosdakaryaOffset, cet. Pertama, 1995
- _____, Wahbah, *Ushulal-Fiqhal-Islami*, Juz 2, Beirut: Dar alFikr, 1986,
- An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Şahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, alih bahasa oleh, Agus Ma'mun, Suharlanetal., *Syarah Şahih Muslim*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2012, jilid 5
- Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih*, "Universitas Muhammadiyah Surabaya", dalam Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid, pdf
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pedoman Puasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

- _____, T.M. Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2012
- _____, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah – NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012
- Bashori, Muh Hadi, *Pergulatan Hisab dan Rukyah di Indonesia Analisis Posisi Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2013
- Dahlan, Abdul Aziz, dan Satria Effendi M. Zein, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid i, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005
- _____, *Ushul Fiqh 2*, t.t.: Departemen Agama RI, t.th
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, tt.
- Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan hari Raya)*, Penerbit Kaki Langit, cet. I, 2005
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Jakarta :Logos Publishing House, 1995
- Faris bin Zakaria, Abu Hasan Ahmad bin, *Maqayisul lugat*, Mesir: Mathbaatul Madani, cet I, 2008
- Fatah, Rohadi Abd, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama, 1991
- Fatah, Rohadi Abd, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. I, 1991
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995,

- Haedar Nashir, Sujarwanto, & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1990, Cet. Pertama,
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang:Program Pascasarjana IAIN Walisongo), 2002
- Hasbi Ash SHiddiqi, Teungku Muhammad *Mutiara Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet I, 2003
- Hassan, Muhammad, *Aplikasi imkan ar-rukyah Prespektif Fiqih Dan Astronomi*, Makalah Majalah Altahrir Vol. 13 No. 2, 2013
- Hidayat, Syamsul, dkk, *Study Muhammadiyah : Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*, Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009,
- Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulugul Marom min Adillati Ahkam*, alih bahasa oleh M. Zaenal Arifin, Jakarta Selatan: Khatulistiwa Press, cet. I, 2014
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, (Penerbit Erlangga), 2007
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), 2007
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, PenerbitAmzah, cet. I, 2005
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Tafsir Al Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 2005,
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Jakarta:Bulan Bintang, 1993
- Ma'ruf, Luwis, *al-Munjidfial-Lughat*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, 1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2010, Cet. Pertama
- Majelis Tarjih dan Tahdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), cet. Kedua, 2009
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Unifikasi Kalender Hijriah*, td, 2015
- Manshural-Jamal, bin Sulaiman, Futuhat al-Wahhab bi Tauḍih Fathul Wahhab, Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th., Jilid II
- Masroeri, A. Ghazalie, Lajnah Falakiyah PBNU, *Penentuan Awal Bulan kamariah Perspektif Nahdlatul Ulama*, tt., td., Bagian ke VI
- Muhammad bin Abdu, Abi Al Hasan Nurdin, *Kitab Ṣaḥih Al Bukhari*, (Darul Kitab ‘Alamiyyah: Beirut-Libanon), 1998
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, Imam Abi Husain, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Daar Kutub Ilmiah, Juz 2, 1413 H/1992 M
- Nashirudin al Albani, Muhammad, *Ṣaḥih Sunan An-Nasa’i*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet. I, 2006
- Penyelenggara dan Penterjemah Tafsir Al Qur‘an, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Purwito, Agus, *Majlis Tarjih Dalam Sorotan, Muhammadiyah Dalam Kritik Dan Komentari*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Raharto, Moedji, *Dasar-Dasar Sistem Kalender Bulan dan Kalender Matahari*, (Bandung:Penerbit ITB), 2013
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, alih bahasa AnasMahyuddin, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Rojabal-Hanbali, Ibnu, *Lataiful Ma‘arif*, maktabah syamilah
- Rosyadi, Imron, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Telaah Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Penelitian Insentif Reguler Kompetitif Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011
- Sairin, Wienata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Hisab & Rukyat*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007

Setyanto, Hendro, *Membaca Langit*, Jakarta: Al-Ghuraba, 2008, cet. 1

Sucipto, Hery KH. Ahmad Dahlan Sang Pencerah, Pendidik dan Pendiri Muhammadiyah, Jakarta : Best Media Utama, 2010, Cet. Pertama

Sudibyo, Muh. Ma'rufin, dimuat dalam jurnal Al-ahkam vol. 24 no. 1, April 2014. Diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah bekerjasama dengan LPKBHI IAIN Walisongo Semarang,

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid 2, 1999

T.M. HasbiAs-Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997

Thaib, Ismail, “ *Penggunaan “Mathla” (Rising Place) Makkah dalam penetapan satu Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah (hari raya Fitri dan Adha)*” dilihat di lampiran

Usman Dan Purnomo Setiadi Akbar, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta:Bumi Aksara, 2006

Yunan, Yusuf M. dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir al-Qur'an, 1973

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Ala Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi,*et al.*, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, cet. II, 2012

Penelitian:

Aetam, Hafidzul, “*Analisis Sikap Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Penyatuan Sistem Kalender Hijriah Di Indonesia*”,Skripsi S1 Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013

Aetam, Hafidzul, *Interpretasi Hadis-Hadis Rukyat Dalam Kajian Falak Muhammadiyah*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang:IAINWalisongo, 2014

- Amri, *Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah (Studi atas Kriteria Wujud al-Hilal dan Konsep Mathla)*, Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, 2012
- _____Amri, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*, makalah Seminar Nasional “*Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H*”, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin 23 Juni 2014 M
- _____Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individu Fakultas Syariah, Semarang: IAIN Walisongo, 2012

Makalah

- Ahmad Hakim, Syarief, *Mengikuti Idul Adha Arab Saudi Dalam Perspektif Syar’ dan Astronomi*, makalah PP PERSIS
- Djamalluddin, Thomas, *Pengertian dan perbandingan Madzhab tentang Hisab Rukyat dan Mathla’(Kritik terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla’ Wilayatul Hukmi)*, "Musyawarah Nasional Tarjih ke-26", PP Muhammadiyah, Padang 1 – 5 Oktober 2003
- Khudhori, Ismail, *Metode Penetapan Awal Bulan Muhammadiyah dalam Perspektif Uşūl Fikih*, makalah call for paper dalam Lokakarya Internasional bertema Towards hijriah’s calender unification, aneffort for seeking crescent’s criterias, scientifically and objectively oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2012
- Rupi’i Amri, *Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Muhammadiyah*, makalah Seminar Nasional “*Kapan Awal dan Akhir Ramadhan 1435 H*”, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Senin 23 Juni 2014 M.h. 8

Wawancara:

Wawancara dengan Amiruddin staff sekretaris PP Muhammadiyah pusat di kantor
PP Muhammadiyah Pusat Yogyakarta Jalan KHA. Dahlan hari Kamis 19
November 2015

Wawancara dengan Oman Fathurrohman pada tanggal 04 Mei 2016 di Aula lantai
1 UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Prof Syamsul Anwar sebagai ketua Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah periode 2010-2015 di Ruang Dosen Prodi
Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari
Selasa 8 Desember 2015 pukul 11.25 WIB.

Website:

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/07/kha2.htm>. Diakses pada Jum'at 11
Maret 2016.

<http://tarjih.Muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>, diakses
Kamis 22 Oktober 2015

<http://museumastronomi.com/wacana-kalender-islam-internasional/> diakses pada
Senin 28 Desember 2015

<http://www.elhooda.net/2014/09/puasa-arafah-didasarkan-wukuf-atau-hari-arafah-9-Zulhijjah/>diakses pada Rabu, 11 November 2015, pkl. 14:00

<http://www.fatwatarjih.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 11.20
WIB

<http://www.fatwatarjih.com/2015/03/doa-iftitah.html> diakses pada hari Minggu,
13 Desember 2015

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-153-det-zulhijah-tahun-baru-hijriah-dan-kalender-islam-global.html>, diakses pada Senin 14 Desember 2015

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html>Diakses pada pada pukul 07.56 wib, tanggal 27 November
2015

<http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-Arafah-mengikuti-wukuf-atau.html>, diakses Kamis 22 Oktober 2015

<http://www.sangpencerah.com/2015/09/kapan-puasa-Arafah-mengikuti-wukuf-atau.html>, diakses hari Kamis 22 Oktober 2015

<https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2010/06/garis-tanggal-Zulhijjah-1423.jpg>. Diakses pada 19 April 2016

lain-lain

Himpunan Fatwa Tarjih Muhammadiyah, pdf,

Keputusan munas tarjih XXV tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, pdf.

Lampiran 1



MAJELIS TARIJH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Alamat: Jl. KHA. Dahlan No. 103 Yogyakarta Telp. +62 274 375025 Faks. +62 274 381031
E-mail: tarjih_ppmuh@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN No. 07/KET/L.1/A/2015

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andi Maulana
NIM : 112111055
Jurusan/Prodi/Fakultas : Ilmu Falak/Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melakukan riset/penelitian di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "Dinamika Perubahan Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang Puasa Arafah Tahun 2000-2015" dan telah melakukan wawancara dengan

1. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Oman Fathurrohman, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kepada yang bersangkutan diberi kewajiban untuk menyerahkan hasil riset skripsinya setelah dilakukan ujian pendadaran/munaqasyah dan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Rabiulawal 1437 H
22 Desember 2015 M

MAJELIS TARIJH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag.

Lampiran 2



'Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh pula menikahkan, dan tidak boleh melamar'. " (Ditakhrijkan oleh Muslim, dari 'Usman; as-San'aniy, II: 102).

7. Hubungan persembadan dengan istri dan bercumbu rayu sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya;

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ، فَمَنْ قَرَضَ فِيهِ مِنَ الْحَجِّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (البقرة: ١٩٧)

Artinya: "Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas (bersetubuh dan bercumbu rayu), berbuat fasia, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (al-Baqarah (2): 197).

Para ulama berpendapat bahwa hubungan persembadan membatalkan haji, dan di samping wajib membayar dam, juga wajib mengulangi haji di tahun berikutnya, sedang bercumbu rayu hanya wajib membayar dam.

Demikianlah larangan-larangan bagi orang yang berihram, maka jika hanya melepas pakaian sebelah atas saja, selama tidak melanggar larangan-larangan tersebut, tidaklah wajib membayar dam.

Adapun waktu pembayaran dam adalah pada hari Nahar (tanggal 10 Dzulhijjah), sebelum tahullul, atau pada hari-hari tasyriq. Apabila tidak mampu menyembelih kambing, di ganti dengan puasa 10 hari; tiga hari di tanah suci pada waktu haji, dan 7 hari di tempat asal (Tuntunan Manasik Haji Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, hal. 99).

Pertanyaan

Bagaimana hukum puasa Arafah yang tidak bertepatan dengan wukufnya jama'ah haji?

H. Amin, BA.

Kajan Krowe Lambeyan Magetan

Jawaban

Pertanyaan Saudara singkat, tetapi jawabannya agak sedikit panjang, karena ada aspek yang menyangkut ijtihad, di mana sama-sama kita ketahui bahwa "ijtihad itu tidak gugur oleh ijtihad". Di samping itu, ijtihad sekalipun tidak tepat (benar), tapi mendapat satu pahala bagi orang yang berijtihad, begitu juga yang mengikutinya.

Kalau kita merujuk kepada Sunnah, Nabi SAW menyuruh kita yang tidak sedang melakukan ibadah haji, sunat berpuasa pada hari wukuf, seperti disebutkan dalam hadits berikut;

صَوْمٌ عَرَفَةَ يَكْفِرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةٍ أَوْ مُسْتَقْبَلَةٍ (رواه الجماعة)

Artinya: "Puasa Arafah dapat menutup (menghapus dosa) setahun yang lalu dan setahun yang akan datang". (HR. Al-Jama'ah)

Menurut bunyi hadits tersebut, kita harus berpuasa pada waktu para hujjaj sedang wukuf di Arafah, bukan pada hari sesudah wukuf. Hal ini tidak ada kesulitan jika kita mempergunakan "mathla' Makkah" dalam penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Dzulhijjah. Tetapi, Lembaga Isbat Departemen Agama, begitu juga ormas-ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia, memakai mathla' wilayah Indonesia, bukan mathla' Makkah. Selama ijtihad kita masih seperti itu, maka ada kemungkinan, kadang-kadang kita berpuasa Arafah tidak tepat pada hari wukuf. Padahal sekarang ini, untuk mengetahui kapan para hujjaj wukuf sangat mudah; dua atau tiga hari sebelum

wukuf. Mufti Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan oleh media cetak dan elektronik ke seluruh dunia. Di Indonesia, Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), dan yang sudah menggunakan mathla' Makkah khusus dalam Hari Raya Haji, bahkan juga untuk Hari Raya Idul Fitri.

Dengan uraian singkat di atas, maka dapat ditebak idealnya kita berpuasa pada hari para hujjaj sedang wukuf, bukan pada hari lainnya, apalagi mengingat selisih waktu Saudi dan Indonesia hanya ± 4 jam. Namun demikian yang mengikuti penetapan Pemerintah (Departemen Agama) dapat disalahkan, puasanya mudah-mudahan diterima dipandang sah secara hukum.

Insyallah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran akan meninjau ulang masalah mathla' ini pada Munas yang akan diselenggarakan di Padang Sumatera Barat Oktober mendatang. Kalau mathla' Makkah dapat kita dapat berpuasa tepat pada hari wukuf dan Hari Raya berbeda. Kita harapkan juga, ormas-ormas yang lain mengikuti soal ini. Masalah ini (mathla') adalah termasuk karena tidak ada nash yang mengharuskan kita mesti menegerinya masing-masing. Perlu kami informasikan, soal tersebut pernah ditulis oleh Saudara Drs. H. Ismu Divisi Fatwa, Hisab, dan Tafsir Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) Suara Muhammadiyah No. 06 Th. ke-88, 16-31 Mei.

Pertanyaan

1. Apakah orang yang tidak melaksanakan shalat tidak ke masjid juga tetap dua rakaat, tidak empat rakaat? Mengingat belum ada keputusan Majelis Tarjih, bagaimana fatwa saja?

2. Apakah mengerjakan dua rakaat itu yang lebih utama dari pada empat rakaat, seperti yang biasa dikerjakan oleh M. Da

Jawaban

Sebelum menjawab pertanyaan Saudara tersebut, jelaskan bahwa kalau ada orang atau warga Muhammadiyah yang tidak atau belum setia dengan fatwa Tarjih yang dirumuskan Muhammadiyah, ada yang pro dan ada yang kontra Muhammadiyah, dinamis dalam menerima dan melaksanakan hal itu sangat kita perlukan tetap hidup di kalangan asal ada dasar pegangannya, tidak karena selera pribadi kami jawab pertanyaan Saudara.

1. Kami akui bahwa Fatwa Majelis Tarjih yang tercantum dalam Suara Muhammadiyah No. 15 Th. ke-87 (sepele katakana) masih sebatas fatwa, benar sekali. Fatwa dalam Munas Tarjih untuk diolah secara berkeadilan. Tetapi hal itu tidak menjadi sesat mengikutinya sesuai fatwa itu, karena fatwa terdapat kepada sejumlah dalil-dalil syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) melakukan istinbatnya. Sedang bagi orang yang belum ada paksaan dan tidak berdosa. Sifat fatwa kecuali kalau sudah ditanfidzkan, itu sudah Muhammadiyah, sebagaimana fatwa-fatwa/putusan Tarjih lainnya yang sudah ditanfidzkan. Perlu Muhammadiyah dalam beberapa hal tidak selalu pendapat yang dipegang banyak orang. Misalnya mengerjakan shalat tarawih 21 rakaat, tetapi Muhammadiyah 11 rakaat bersama witirnya. Begitu juga kebanyakan rukyah dengan mata telanjang dalam penetapan Syawwal dan 10 Dzulhijjah, tetapi Muhammadiyah dan rukyah bil 'ilmi.

2. Mengenai manakah yang lebih utama dua rakaat? Dalam hal ini bukan utama dan tidak utama kuat dasarnya. Menurut kami, yang kuat adalah

Pergunakan "Matla' (Rising Place) Makah"

dalam Penetapan Satu Ramadhan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah (Hari Raya Fitri dan Adha)

OLEH: DRS. H. ISMAIL THAM

LEWAT tulisan ini saya ingin menghimbau Menteri Agama RI, ormas-ormas Islam terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berusaha untuk masa-masa yang akan datang, jangan lagi terjadi dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti yang kita alami selama ini. Hal ini tentu memerlukan terobosan-terobosan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Jangan lagi mempertahankan pendapat kelompoknya masing-masing dengan dalih "berbeda pendapat antara umatku sebagai suatu rahmat". Itu adalah hadis lemah, bahkan tak ada asalnya. Bahkan isinya sangat berlawanan dengan manthuq dan jiwa al-Qur'an. (Baca: ayat 46 surat al-Anfal).

Lebih-lebih pada hari raya Adha yang lalu, diakui atau tidak, Menteri Agama RI lewat "Dewan Isbat" telah menetapkan suatu ketetapan yang tidak populer, yaitu mendorong orang untuk berpuasa sunat Arafah bukan pada hari wuquf dan berhari raya Adha pada hari Tasyri', sungguh fatal dan sangat lucu. Dengan kata lain membiarkan umat Islam yang kebanyakan mereka tidak mempunyai pemahaman yang memadai dalam agama, terperosok kepada perbuatan bid'ah. Ini benar-benar besar tanggungjawab Menteri Agama. Sekali lagi Nabi saw menyuruh kita berpuasa sunat Arafah (ta'abbudi) pada hari Arafah, bukan pada hari lainnya.

Kalau zaman-zaman silam terjadi hal itu dapat dimengerti karena informasi belum secepat dan seanggih seperti sekarang. Sekarang ini apa yang terjadi di Makkah al-Mukarramah dalam beberapa menit saja sudah dapat diketahui di seluruh dunia, apalagi Indonesia yang bertafaut waktu kurang lebih 4 jam saja.

Mungkin timbul pertanyaan, adakah cara untuk menyatukan hari raya Fitri dan Adha? Saya dengan penuh optimis menjawab, mengapa tidak! Syaratnya: ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, Persis dll serta Menteri Agama mau mengkaji ulang apa yang sudah dianggap baku dipegang selama ini. Saya di sini tidak mempersoalkan lagi masalah "rukyat bil fi'li, istikmal dan hisab", sebab ketiga-tiga cara itu dibenarkan oleh syara', bukan salah satunya saja yang bisa dipakai, lain tidak. Menurut pengamatan saya "Dewan Isbat" Depag, selama ini bekerja-maaf atas dasar rukyah bil fi'li semata-mata, sidang-sidangnya itu proforma belaka. Tidak ada terobosan oleh Menteri Agama baik dulu sampai sekarang.

Dengan lain perkataan kita harus berani berjihad dalam masalah tersebut, karena memang pintunya terbuka lebar bagi orang yang memenuhi persyaratan-persyaratannya dan dilakukan idealnya secara jama'i (kolektif). Cara yang akan saya ajukan ini tidak akan menyinggung NU ataupun Muhammadiyah kalau kedua ormas ini berfikirnya sehat dan tidak emosional yaitu kita harus mengkaji ulang masalah "Matla' (Rising Place)". Sudah saatnya kita di Indonesia tidak perlu lagi mempertahankan "matla-matla" wilayah hukum Indonesia, tetapi kita mengambil "matla" Makkah al-Mukarramah (Saudi Arabia), masalah matla-matla adalah masalah ijtihadiah bukan masalah Taabbudi.



Yang saya maksudkan di sini dengan matla' yaitu matla' untuk hilal bukan matla' untuk matahari. Para ulama telah sepakat menetapkan dalam menghadapi waktu-waktu yang dipautkan dengan matahari terbit, tergelincir dan terbenam harus mempergunakan matla' setempat/lokal, perbedaan matla' di sini tidak menjadi persoalan dan harus demikian (perhatikan firman Allah ayat 17 surat ar-Rum). Begitu pula dalam kita membuka, berimsak, tetap dipautkan dengan matla' matahari.

Berbeda halnya dalam menghadapi perbedaan matla' dalam menentukan awal bulan, Idul Fitri, Idul Adha, wuquf dan hari-hari tasyrik, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, artinya ada yang tetap kukuh bahkan ngotot mempertahankan matla' daerahnya, negerinya atau tempatnya dan ada pula yang tidak mengikatkan dirinya dengan matla' tempatnya/negerinya, bahkan mengambil matla' negara lainnya. Pendapat kedua ini argumentasinya jauh lebih kuat dan pendapat pertama (ingat ini masalah ijtihadiah). Khilaf di sini bukanlah suatu khilaf (perbedaan pendapat) dalam bidang aqidah atau dalam bidang dasar-dasar hukum Islam, tetapi lebih disebabkan karena hilangnya rasa kesatuan dan persatuan di antar umat Islam sendiri karena intern atau ekstern yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Kalau orang beralasan bukankah sahabat Ibnu Abbas tidak memakai matla' negeri Siria (Damaskus), tetapi beliau tetap bertahan dengan matla' Madinah dimana waktu itu beliau sendiri sebagai Gubernur

i dan Adha
SMAIL THA

Amah, tidak tunduk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah waktu itu? Pertanyaan seperti itu bagi orang yang mau dengan cermat mempelajari sejarah Islam, dengan mudah dapat dijawab, yaitu dikarenakan perbedaan yang bersifat politis, akibat dari harmonis hubungan Ibnu Abbas dengan Muawiyah. Muawiyah sah sebagai khalifah, dan di masa pemerintahannya Muawiyah bin Abi Thalib Muawiyah tidak mau tunduk kepada khalifah syahid ke 4 ini dengan dalih dia mempunyai hak karena kematian ayahnya bin Affan secara dhalim. Pandangan politik Ibnu Abbas sama dengan Ali bin Abi Thalib ra. (Baca: al-fitanatul kubra karangan Taha Saadun). Muawiyah sendiri mengangkat sahabat Ibnu Abbas sebagai gubernur Madinah boleh dik. 'akan penuh perbitungan politik, supaya timbul gejolak mengingat Ibnu Abbas di samping ilmunya sangat dekat dengan Rasulullah saw.

Kebanyakan ahli tahqiq dari golongan Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mereka tidak menjadikan perbedaan matla' sebagai alasan menetapkan awal Ramadhan, awal syawal dan awal Zulhijjah. Hal ini tidak menyalahi ushul fiqh dan pendapat para mujtahid.

Prof. Dr Muhammad Abu Zaharah, ahli hukum Islam kenamaan Mesir, dengan tegas mengatakan: "Tidak ragu-ragu kami memilih pendapat yang tidak menempatkan perbedaan matla' (Ikhtilaful matla') sebagai titik tolak puasa", karena pertimbangan maslahat kesatuan dan kesatuan umat Islam, karena umat Islam adalah umat satu (Baca: ayat 92 surat Al-Anbiya' dan ayat 53 surat Al-Muminun).

Mengapa saya menghimbau agar dipakai matla' Makkah al-

Mukarramah (Saudi Arabia), bukan Mesir, Palestina, Iran dan lain-lainnya? karena di tanah suci itulah Allah meletakkan Ka'bah, kiblat kaum muslimin seluruh dunia, di situ letak baitullah, di situ pula letaknya Safa, Marwa, Muzdalifah, Arafah (tempat wuquf) dan Mina (tempat atau lokasi pelemparan jumrah). Di sini pula permulaan turunnya wahyu Al-Qur'an dan penutup wahyu. Juga di situ Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul. Makkah adalah negeri haram (al-baladul haram), tempat umat Islam seluruh dunia, di sanalah para hujjat berkumpul setiap tahun melaksanakan rukun Islam kelima. Dilihat dari segi geografi, Makkah benar-benar di tengah-tengah dunia, baik ke Timur atau ke Barat.

Adakah tempat di permukaan bumi ini yang paling mulia dan terpuh dari makkah itu? karena itu sangatlah layak matla'nya kita jadikan matla' pemersatu umat Islam dalam menghidupi waktu-waktu ibadah yang dipautkan dengan bulan, bukan dengan matahari. Selang waktu dengan Indonesia Cuma 4 jam. Insya Allah kalau himbauan ini diperhatikan dan direnungkan baik-baik melepaskan diri dari fanatisme mazhab dan taklid serta punya keberanian dalam berjihad, kita tidak lagi menghadapi dua hari raya, baik untuk Idul Fitri atau Idul Adha, juga untuk awal berpuasa, tanpa perlu mempermasalahkan jalan mana yang ditempuh pemerintah Saudi apa ru'yah apa istikmal atau hisab.

Memang idealnya Makkah dan Madinah itu diurus bersama oleh umat Islam sedunia, tapi ide ke arah itu tuntut saat ini sulit diwujudkan, mudah-mudahan pada suatu waktu bisa terealisasi. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu an ba'duhu (sesuatu yang belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya atau sebagiannya).

Penulis, Ketua Bagian Fatwa Majelis Tarjih dan PPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah Di Yogyakarta

RI HAL 21 MU DAN ULAMA

يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْوَلَدَ
بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْرُكْ عَلَيْهِ
أَخَذَ النَّاسُ رُؤُسَهُمْ جَاهًا فَسُيْلُوا
فَأَقْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا (أحمد)

yaitu matla' unta
epakat menetapkan
dengan matahari
gunakan matla'
jadi persoalan dan
at ar-Rum). Begit
an dengan matla'

aan matla' dalam
uquf dan hari-hari
ulama, artinya ada
matla' daerahnya
mengatakan diri
ambil matla' negar
uh lebih kuat dan
ilaf di sini bukan
aqidah atau dalam
jadi hancur, sebab orang-orang bodoh dan pandir diangkat menjadi
isebabkan karena
ilmu mereka, yang fatwa-fatwanya tidak berdasarkan ilmu
umat Islam sendiri
getahuan. Jelaslah bahwa peran ulama dalam kehidupan ini sangat
erlu terjadi.

abas tidak memu
p bertahan dengan
sebagai Gubernur

Dari 'Abdullah bin 'Amer bin al-'As, ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidaklah menarik ilmu dengan mencabutnya dengan sekaligus dari manusia, melainkan mencabut ilmu dengan cara mencabut ulama, sehingga apabila tidak ada lagi seorang ilmuwan, manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Maka apabila mereka ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan". (Ditakhrijkan oleh Muslim, II, Kitabul 'Ilm, No. 13/173)

Hadis tersebut menggambarkan, apabila sudah tidak ada lagi seorang ulama pun di dunia ini, maka manusia akan sesat dan akhirnya menjadi hancur, sebab orang-orang bodoh dan pandir diangkat menjadi pemimpin mereka, yang fatwa-fatwanya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Jelaslah bahwa peran ulama dalam kehidupan ini sangat penting dan sangat mulia.

Pernyataan Sahabat Nabi saw:

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bahwa ilmu adalah lebih utama dari harta karena tujuh segi:

- 1). Ilmu adalah warisan para Nabi, sedang harta adalah warisan para Fir'aun.
- 2). Ilmu tidak akan berkurang jika diberikan orang lain, sedang harta akan berkurang jika diberikan kepada orang lain.
- 3). Harta memerlukan peragaan, sedang ilmu menjaga pemiliikanya.
- 4). Apabila seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan hartanya bagi keluarga yang ditinggalkan, sedangkan ilmu akan dibawa masuk bersamanya dalam kubur.
- 5). Harta dapat diraih, baik oleh orang mukmin maupun oleh orang kafir, sedang ilmu agama hanya dapat diraih oleh orang mukmin.
- 6). Semua manusia membutuhkan kepada orang 'alim, dalam masalah keagamaan mereka, sedang pemilik harta tidak dibutuhkan dalam masalah keagamaan.
- 7). Ilmu memperkuat seseorang ketika melalui jalan yang lurus, sedang harta menghalang-halangnya. (Al-Jazairiy, 1403: 21).

3. Pernyataan sebagian ulama; seorang ahli syi'ir menyatakan sebagai berikut:

وَفِي الْجَهْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ، يَنْفَلِهِ
وَأَجْسَاءُ مَهُمَّ قَبْلَ الْقَبْرِ قَبُورُ
وَإِنَّ أَمْرًا لَمْ يَحْيَ بِالْعِلْمِ مَيِّتٌ
وَلَيْسَ لَهُ حَتَّى التَّشْوِيرِ تَشْوِيرُ

Orang bodoh bagaikan mayit sebelum mati karena kebodohnya, dan jasad mereka bagaikan kubur sebelum dikubur.

Sesungguhnya manusia yang hidup tanpa ilmu adalah mayit, dan tidak dapat bangkit sebelum dibangkitkan. (Al-Jazairiy, 1403: 23).

Lampiran 3

Hasil Wawancara dengan Oman Fathurrohman, SW

**Auditorium 1 lantai 1 UIN Walisongo Semarang pada hari Rabu Wage 4 Mei
2016**

1. Bagaimana kriteria bisa dikatakan fatwa di Majelis Tarjih?

Sebenarnya tidak semua yang dibahas di suara Muhammadiyah dalam bentuk jawaban bisa dikatakan fatwa. Namun apabila pembahasan tersebut dimuat dan dibahas dalam rubrik tanya jawab memang sudah dikatakan fatwa. Akan tetapi, kedudukannya belum tentu mengikat seiring dengan adanya pembahasan ditingkat yang lebih tinggi dan ditanfidzkan yaitu pada Musyawarah Nasional Tarjih yang diadakan setiap minimal 2 kali dalam satu periode Mukhtamar. Namun jawaban tersebut bisa saja dikatakan fatwa untuk kalangan mereka sendiri yang membahas yaitu di divisi fatwa. Dalam majalah suara muhammadiyah itu yang di rubrik tanya jawab dikelola oleh divisi fatwa. Sehingga hasil jawaban tersebut masih dikatakan fatwa dalam lingkup divisi saja karena belum ditanfidzkan sehingga dari segi kekuatan belum bersifat mengikat. Namun dalam Rubrik tanya jawab memang itu sudah dikatakan fatwa hasil dari divisi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

2. Menurut bapak bagaimana latar belakang adanya fatwa mengenai puasa Arafah tahun 2003?

Dalam perkembangannya di Muhammadiyah sendiri bahwa terjadinya perubahan pemahaman yang dulu pernah ada bahwa pelaksanaan puasa Arafah hendaknya mengikuti sebagaimana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah namun sampai sekarang Muhammadiyah menetapkan berdasarkan kriteria dan penanggalan sendiri, setidaknya yang menjadikan alasan karena kurang setuju dengan beberapa penetapan yang dilakukan Arab Saudi. Ketika di Muhammadiyah sendiri melakukan hisab dan memperhitungkan bahwa

hilal masih di bawah ufuk, namun Arab Saudi menetapkan berbeda karena ada yang melihat hilal dan laporan tersebut diterima, padahal menurut perhitungan kontemporer hilal masih di bawah ufuk. Maka menurut Muhammadiyah ada yang tidak benar daripada penetapan yang dilakukan Arab Saudi, sehingga belum tentu benar mengikuti apa yang diputuskan Arab Saudi sehingga tidak perlu mengikuti keputusan Arab Saudi akan tetapi tetap dengan hasil perhitungan yang ada di Muhammadiyah sendiri, dengan pengertian menyesuaikan dengan tanggal yang ada di Indonesia.

3. Bagaimana perkembangannya permasalahan mathla dalam Munas Tarjih ke 26 tahun 2003 yang diselenggarakan di Padang?

Dalam Munas tersebut memang dibahas mengenai penetapan menggunakan mathla' wilayahul hukmi, dengan ketentuan sebagai berikut; kalau ternyata batas wujudul hilal membelah Indonesia kebijakannya diserahkan pada pimpinan pusat yang artinya bahwa Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu harus satu tidak boleh terpisah yang dapat diartikan bahwa kalau dikembalikan ke dalam fiqh itu namanya mathla' wilayahul hukmi. Maka dari itu, Muhammadiyah dalam menghisab awal Bulan dengan memakai tempat di Yogyakarta bukan berarti mengikuti Yogyakarta akan tetapi juga dilihat secara keseluruhan di Indonesia bahkan di seluruh Dunia sehingga bisa dilihat batas batas wujudul hilalnya.

4. Kaitannya dengan Arafah sebagai acuan penyatuan kalender Hijriyah global, apakah Muhammadiyah juga memakai konsep mathla' global sebagai acuan?

Bukan berarti memakai konsep mathla' global, karena yang namanya mathla' itu apabila hilal terlihat di suatu tempat kemudian berlaku sampai radius mana. Namun, berbeda dengan apa yang di kalender internasional hilal itu diperhitungkan disuatu tempat itu berapa dengan memakai kriteria-kriteria tertentu, misalkan tidak boleh memaksa suatu tempat masuk tanggal satu padahal bulan nyata-nyata di bawah ufuk.

5. Menurut pandangan bapak, mengenai pelaksanaan puasa Arafah idealnya seperti apa?

Menurut saya idealnya bukan mengikuti apa yang diputuskan oleh Arab Saudi, akan tetapi harus bersamaan dengan peristiwa wukuf di Arafah, caranya dengan kalender internasional dan prinsip penanggalan yang sama antara di Arab Saudi dengan di tempat yang lain. Dengan arti bahwa waktu puasa Arafah menjadi acuan dalam penyatuan kalender berskala global.

6. Sistematika penetapan fatwa di Majelis Tarjih?

Perlu diketahui bahwa di Majelis Tarjih terdapat tiga, ada putusan, fatwa, dan wacana. Putusan lewat Musyawarah Nasional Tarjih, fatwa lewat diskusi dan perbincangan di Majelis sedangkan wacana bisa dari pendapat pribadi atau majelis mengeluarkan pendapat wacana wacana tapi itu tidak merupakan putusan maupun fatwa hanya wacana saja.

Lampiran 4

Wawancara Dengan Prof. Dr. Syamsul Anwar

**Di Ruang Dosen Prodi Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta pada hari Selasa 8 Desember 2015**

1. Bagaimana mekanisme Majelis Tarjih dalam mengeluarkan sebuah fatwa

Sebelum pembahasan fatwa mengenai puasa Arafah, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa terdapat 3 produk Majelis Tarjih, yaitu;

1. Putusan

Putusan itu sifatnya formil mengikat kepada warga, anggota maupun organisasi. Sedangkan forum yang mengambil putusan adalah adalah Musyawarah, dan yang membuat putusan adalah Munas Tarjih Nasional. Adapun produk dari Musyawarah Nasional Tarjih dinamakan dengan Putusan Tarjih. Putusan ini bersifat Nasional dalam arti berlaku bagi seluruh warga Muhammadiyah di Indonesia. Dalam mengambil putusan forum Musyawarah berangkat dari sebuah mekanisme besar

dan waktu pelaksanaannya juga tidak setiap tahun yaitu dua kali atau minimal sekali setiap satu periode muktamar dimana dalam pelaksanaannya kadang-kadang berdiri sendiri kadang kadang dilakukan bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah. Maka dari itu putusan ini sifatnya formil dan mengikat bagi semua warga Muhammadiyah. Putusan tarjih dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Tarjih, dahulu namanya Muktamar Tarjih. Peserta Munas sendiri yang terdiri dari Ulama dan cendekiawan Muhammadiyah disebut sebagai Anggota Tarjih. Komposisinya terdiri dari personil Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan dan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dan utusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Se-Indonesia.

2. Fatwa

Fatwa sendiri sebagai sebuah produk di Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sifatnya tidak mengikat seperti halnya putusan. Tetapi tetap mencerminkan pandangan Muhammadiyah dalam suatu permasalahan agama. Sebagai produk ijtihad dari Majelis tarjih fatwa memungkinkan untuk mengalami perubahan, dalam prosesnya fatwa di Majelis Tarjih keluar sekitar 2 minggu sekali.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa fatwa itu secara hierarki berada di bawah putusan nasional tarjih, maka fatwa tidak boleh berbeda dengan putusan tarjih. Maka dari itu menurut Syamsul Anwar sebagai implikasinya ketika terdapat perbedaan antara fatwa dan putusan tarjih tentu putusan tarjih yang diambil, namun apabila ada warga Muhammadiyah yang mengamalkan fatwa tersebut yang tidak disetujui oleh keputusan munas tarjih Nasional maka itu sah-sah saja, akan tetapi dengan catatan bahwa orang tersebut tidak boleh mengatasnamakan sebagai bagian dari warga Muhammadiyah, dalam arti fatwa tersebut hanya untuk diamalkan oleh pribadi dan tidak boleh mengajak orang lain untuk mengikutinya. Fatwa Majelis Tarjih umumnya dimuat di dalam Majalah Suara Muhammadiyah yang kemudian akan

dijadikan buku Fatwa-fatwa Tarjih: tanya Jawab Agama setelah fatwa tersebut dibahas di forum Musyawarah Nasional Tarjih.

3. Wacana

Sedangkan yang terakhir dari produk Majelis Tarjih PP Muhammadiyah yaitu wacana, merupakan pengembangan pemikiran dalam soal keagamaan yang bersifat tidak mengikat secara kelembagaan, diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal.

2. Bagaimana kalau ada fatwa yang bertentangan dengan putusan?

Pada hakikatnya fatwa tidak boleh bertentangan dengan putusan, karena putusan dibuatnya oleh majelis nasional dan memiliki hukum tetap. Namun bagi warga Muhammadiyah yang mengamalkan fatwa tersebut itu hanya boleh pribadi tidak boleh mengatasnamakan Muhammadiyah. Karena itu kewenangan dan dirinya sendiri. Karena secara kelembagaan putusan itu bersifat mengikat dibanding dengan fatwa.

3. Bagaimana pandangan bapak mengenai pelaksanaan puasa Arafah?

Mengenai pelaksanaan puasa Arafah apakah harus sesuai dengan prosesi jama'ah haji melaksanakan wukuf di Arafah atau tidak menurut saya wajib bersamaan, kalau tidak akan menimbulkan masalah oleh karena itu menjadi penting dengan penetapan sistem kalender agar puasa Arafah bisa jatuh satu hari di seluruh dunia maka dari itu harus ada kalender yang bersifat internasional.

4. Bagaimana pandangan bapak sendiri mengenai konsep mathla'?

Mathla itu merupakan upaya ulama zaman dahulu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tetapi tidak berhasil karena itu mathla' itu tidak bisa dipakai harus ditolak, dengan kata lain dunia ini dianggap satu mathla' tidak bisa berbeda-beda mathla'.

5. Di Muhammadiyah sendiri apakah masih menggunakan konsep mathla'?

Secara lembaga di Muhammadiyah sendiri memang masih menggunakan mathla wilayatul hukmi sesuai dengan putusan lama yang belum diubah. Namun itu juga menjadi persoalan, itu merupakan hasil putusan sejak dahulu dan ditetapkan resmi secara kelembagaan di Muhammadiyah tahun 2003. Untuk sekarang Muhammadiyah sendiri sedang bergerak ke arah kalender Internasional sesuai dengan pembahasan di Muktamar Makassar kemarin, dan ketika kita bergerak kepada kalender Internasional maka tidak ada lagi konsep mathla' dalam Internasional. Dan kalau pun kita katakan ada mathla' maka istilahnya mathla' seluruh dunia satu mathla'.

BIODATA PENULIS

Nama : Andi Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 16 Januari 1992
Alamat Rumah : Cilakar, Pangebatan, Bantarkawung, Brebes
Alamat Sekarang : Yayasan Pembina Mahasiswa Islam (YPMI) PP. Al-Firdaus, Jl. Honggowongso no. 6 Ringinwok Ngaliyan Semarang (50181)
Email : maulanapatriot@gmail.com
No. Handphone : 0852 8720 6925

Riwayat Pendidikan

1. Formal:

- Sekolah Dasar Negeri Pangebatan 04, lulus tahun (1998-2004)
- Sekolah Menengah Pertama Islam Ganggawang, (2004-2007)
- Madrasah Aliyah Ma'arif NU 01 Bantarkawung Brebes, (2007-2010)
- Universitas Islam Negeri Walisongo, (2011-sekarang)

2. Nonformal:

- Pondok Pesantren Ta'allumul Huda, Salem, Brebes (2004-2011)
- Pondok Pesantren At-Tibyan, Sendang, Majalengka (2014)
- Pondok Pesantren Al-Firdaus, Ngaliyan Semarang, Jawa Tengah (2011-2016)
- Pyramid English Course (2012)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) CSSMoRA UIN Walisongo Semarang (2013-2014)
2. Redaktur Majalah Zenith